



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

TUGAS AKHIR - RP 141501

**ARAHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PESISIR KECAMATAN PASEAN KABUPATEN
PAMEKASAN**

NUR HIDAYAT
NRP 3609100005

Dosen Pembimbing
Arwi Yudhi Koswara, S.T, M.T

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya 2016



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember

FINAL PRONJECT - RP 141501

**THE DICTATION OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
OF THE COASTAL SUB-DISCTRICT OF PASEAN,
PAMEKASAN REGENCY**

NUR HIDAYAT
NRP 3609100005

Advisor
Arwi Yudhi Koswara, S.T, M.T

DEPARTMENT OF URBAN AND REGIONAL
PLANNING

Faculty of Civil Engineering and Planning
Sepuluh Nopember Institute of Technology
Surabaya 2016

HALAMAN PENGESAHAN

ARAHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
pada
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Sipil Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

NUR HIDAYAT

3609100005

Disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir



Arwa Yudhi Koswara, S.T, M.T

198005122005011002

SURABAYA, 20 JANUARI 2016

**ARAHAN PENGEMBANGAN INFRASTRUTUR
WILAYAH PESISIR KECAMATAN PASEAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

Nama Mahasiswa : Nur Hidayat
NRP : 3609100005
Jurusan : Urban and Regional Planning,
FTSP - ITS
Dosen Pembimbing : Arwi Yudhi Koswara, S.T.,
MT

ABSTRAK

Kecamatan Pasean memiliki potensi sumberdaya hasil pesisir, terutama pada sektor perikanan. Dalam RTRW juga dijelaskan bahwa Kecamatan Pasean sebagai Pusat Pengembangan Kawasan dan merencanakan pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan pelabuhan dan pengolahan hasil perikanan. Namun, dalam RTRW belum ditentukan infrastruktur pesisir apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung sektor perikanan, termasuk juga sektor perdagangan yang mempunyai peran penting terhadap pengembangan wilayah pesisir.

Penelitian ini menentukan infrastruktur apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir untuk mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa. Selanjutnya dilakukan tahapan analisis untuk mencari infrastruktur apa saja yang dibutuhkan di wilayah pesisir. Tahap pertama yaitu menggunakan alat analisis Deskriptif untuk mengidentifikasi kondisi eksisting infrastruktur, tahapan selanjutnya menggunakan alat analisa Importance-Performance Analysis untuk mengetahui tingkat kepentingan dan tingkat kinerja infrastruktur, dan tahap akhir menggunakan alat analisa Triangulasi untuk membuat arahan pengembangan infrastruktur berdasarkan peran dan fungsi wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan infrastruktur yang dibutuhkan di wilayah pesisir pasean yaitu: jaringan jalan, moda transportasi, fasilitas pendukung transportasi, jaringan air bersih,

jaringan listrik, drainase, sistem pengelolaan limbah dan sanitasi, telekomunikasi, persampahan, tempat pelelangan ikan, cold storage, pabrik es, SPBU, dan koperasi unit desa. Kemudian dari infrastruktur tersebut dianalisis menggunakan Importance-Performance Analysis untuk mencari infrastruktur yang mempunyai tingkat kepentingan tinggi di wilayah pesisir Pasean. Setelah mengidentifikasi infrastruktur yang dibutuhkan dan menganalisis infrastruktur berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja, maka diketahui infrastruktur berdasarkan kuadran yang nantinya menjadi arahan pengembangan infrastruktur. Arahan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan yaitu: kuadran I peningkatan kinerja infrastruktur TPI, dan KUD serta penyediaan infrastruktur Cold Storage dan Pabrik Es di Desa Tlontoraja dan Desa Batukerbuy. Kuadran II penyediaan infrastruktur pendukung transportasi di Desa Tlontoraja, pengelolaan limbah dan sanitasi di sepanjang jalan arteri dan lokal. Juga diperlukan penanganan pada kondisi jalan yang berlubang serta pengaspalan pada jalur jalan yang masih makadam, terutama pada akses dari tempat pelelangan ikan menuju pasar (Desa Tlontoraja). Kuadran III pengadaan fasilitas SPBU di Desa Tlontoraja. Kuadran IV Penyediaan infrastruktur persampahan dan drainase pada jaringan lingkungan serta peningkatan kinerja telekomunikasi, jaringan air bersih dan jaringan listrik di wilayah pesisir pasean

Kata Kunci: *wilayah pesisir, infrastruktur, analisa deskriptif, analisa kepentingan dan kinerja, analisa triangulasi*

**THE DICTATION OF INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT
OF THE COASTAL SUB-DISTRICT OF PASEAN,
PAMEKASAN REGENCY**

Name : Nur Hidayat
NRP : 3609100005
Departement : Urban and Regional Planning
FTSP - ITS
Advisor : Arwi Yudhi Koswara, S.T., MT

ABSTRACT

Sub District of Pasean have the potential resources results, particularly on the coastal fishery. In RTRW well described that Sub District of Pasean as a center for development the region and plan the development of infrastructure, including the construction of ports and processing the results of the fishery. However, in coastal infrastructure RTRW not determined what was needed to support the fisheries sector, including the trade sector also has an important role to the development of the coastal area.

This research determine what infrastructure is needed in the development of the coastal area to support the fishery and trade services. The next stage of analysis is performed to look for any needed infrastructure in the coastal area. The first stage that is using Descriptive analysis tools to identify the condition of the existing infrastructure, the next stage of analysis tools using Importance-Performance Analysis to find out the level of interest and the performance level of infrastructure, and the final stage using Triangulation analysis tools to make landing infrastructure development based on role and function of the coastal area of Sub District of Pasean

Based on the research results obtained the needed infrastructure in the coastal region of Pasean namely: road networks, transportation, support facilities, transportation networks of clean water, electricity networks, drainage, waste management and sanitation systems, telecommunications, garbage, fish auction place, cold storage, ice factories, gas stations, and cooperative unit in the

village. Then from the infrastructure are analyzed using their Importance-Performance Analysis to search infrastructure that has a high level of interest in the coastal region of Pasean.

After identifying the required infrastructure and analyze infrastructure based on the importance and level of performance, then known to the infrastructure based on quadrant who later became the direction of infrastructure development. The dictation of infrastructure coastal Subdistrict Pasean, Pamekasan Regency are : quadrant I performance improvements TPI and KUD, provision of infrastructure for Cold Storage and ice factory in the village of Tlontoraja and the village of Batukerbuy. Quadrant II results the provision of supporting infrastructure of transport in the village of Tlontoraja, waste management and sanitation along the arterial and local road. The handling is also required on hollow road conditions as well as the paving on the streets that still makadam, particularly on access from the fish auction market place (Tlontoraja village). Quadrant III results the procurement of gas station facilities at the village of Tlontoraja. Quadrant IV results provision of garbage infrastructure and drainage on the network environment as well as improved performance of telecommunications network, clean water and electricity network in the coastal region of Pasean

Keyword : coastal area, infrastructure, Descriptive analysis tools , Importance-Performance Analysis, Triangulation analysis tools

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya tugas akhir ini bisa diselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Rasulullah SAW.

Penulisan tugas akhir ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dengan judul: *Arahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan*

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, banyak pihak yang memberikan bantuan. Oleh karena itu ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Ayah dan ibunda tercinta, yang dengan segala do'a dan perhatiannya turut memberikan dorongan dan kepercayaan;
2. Bapak Arwi Yudhi Koswara S.T., M.T selaku dosen pembimbing tugas akhir ini bisa selesai;
3. Ibu Belinda Ulfa Aulia, S.T., MSc selaku koordinator tugas akhir;
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota yang mendidik dan memberi masukan dalam penyelesaian tugas akhir;
5. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa dituliskan semuanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan Bapak, Ibu, dan Saudara/i. Dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Surabaya, Januari 2015
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Sasaran	6
1.4 Ruang Lingkup.....	8
1.4.1 Ruang Lingkup wilayah	8
1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan	11
1.4.3 Ruang Lingkup Substansi.....	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
1.7 Kerangka Berpikir.....	13
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Pengembangan Wilayah.....	15
2.1.1 Pengembangan Wilayah Pesisir.....	16
2.1.2 Pengembangan Wilayah Pesisir berkelanjutan	17
2.2 Infrastruktur	20
2.2.1 Definisi Infrastruktur.....	20
2.2.2 Peran Infrastruktur	21
2.2.3 Penggolongan Infrastrukur	22
2.3 Kebijakan Terkait Wilayah Penelitian.....	28
2.4 Tinjauan Penelitian Sebelumnya	28

2.5 Sintesa Pustaka.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Pendekatan Penelitian	43
3.2 Jenis Penelitian.....	44
3.3 Variabel Penelitian	45
3.4 Populasi dan sampel.....	49
3.4.1 Populasi.....	49
3.4.2 Sampel	49
3.4.2.1 <i>Purposive Sampling</i>	49
3.5 Metode Penelitian	57
3.5.1 Metode Pengumpulan Data Primer.....	58
3.5.1.1 Observasi.....	58
3.5.1.2 Kuisisioner.....	58
3.5.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder	60
3.5.2.1 Survei Instansi	60
3.5.2.2 Survey Literatur	60
3.6 Teknik Analisa Data.....	62
3.6.1 Mengidentifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	62
3.6.2 Menganalisis Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja Infrastruktur Wilayah Pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	62
3.6.3 Merumuskan Arah Pengembangan Infrastruktur Berdasarkan Peran dan Fungsi Wilayah Pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	65
3.7 Tahapan Penelitian	66
BAB IV Gambaran Umum.....	75
4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi	75
4.1.1 Batas Administratif	75
4.1.2 Kependudukan dan Karakteristik Sosial.....	76
4.2 Identifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	77

4.2.1	Jaringan Jalan	77
4.2.2	Moda Transportasi	83
4.2.3	Fasilitas Pendukung Transportasi	84
4.2.4	Terminal	85
4.2.5	Jaringan Air Bersih	85
4.2.6	Jaringan Listrik	86
4.2.7	Drainase	86
4.2.8	Limbah dan Sanitasi	87
4.2.9	Telekomunikasi	87
4.2.10	Persampahan	93
4.2.11	Tempat Pelelangan Ikan (TPI).....	93
4.2.12	Cold Storage.....	94
4.2.13	Pabrik Es	94
4.2.14	SPBU	94
4.2.15	Koperasi Unit Desa	95
4.3	Identifikasi Kondisi Sosial Budaya Pesisir Pasean .	96
4.3.1	Perekonomian Pesisir Pasean	96
4.4	Analisa dan Pembahasan	103
4.4.1	Mengidentifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	105
4.5	Analisa dan Pembahasan	107
4.5.1	Menganalisis Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja Infrastruktur Wilayah Pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	107
4.5.2	Analisis Infrastruktur Berdasarkan Tingkat Kepentingan Dan Kinerja	108
4.5.3	Merumuskan Arah Pengembangan Infrastruktur Berdasarkan Peran dan Fungsi Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	113
BAB V KESIMPULAN.....		125
5.1	Kesimpulan	125
5.2	Rekomendasi.....	127

DAFTAR PUSTAKA.....	xix
LAMPIRAN	xxiii
BIODATA PENULIS.....	xxxxi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Batas Administrasi Wilayah	11
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir.....	13
Gambar 2.1 Hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan alam yang harmoni.....	25
Gambar 3.1 Kuadran IPA.....	63
Gambar 3.2 Analisa Triangulasi.....	65
Gambar 3.3 Tahapan Penelitian	68
Gambar 4.1 Peta Jaringan Jalan Kecamatan Pasean	77
Gambar 4.1 Kondisi Akses Jalan Dari TPI Ke Pasar Pasean Di Desa Tlontoraja.....	80
Gambar 4.3 Kondisi Jalan Antar Kecamatan Di Jalan Penghubung Antar Kecamatan.....	80
Gambar 4.4 Peta Cakupan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.....	87
Gambar 4.5 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik (SANIMAS)	89
Gambar 4.6 Tempat Pelelangan Ikan di Desa Tlontoraja.....	91
Gambar 4.7 Kondisi Fasilitas TPI di Desa Tlontoraja.....	92
Gambar 4.8 Kondisi Fasilitas SPBU di Desa Tlontoraja.....	93
Gambar 4.9 Kondisi Fasilitas KUD di Desa Tlontoraja.....	93
Gambar 4.10 Pengelolaan Perikanan di Desa Tlontoraja.....	95
Gambar 4.11 Pengolahan Hasil Tangkap di Desa Tlontoraja	95
Gambar 4.12 Industri Rumahan Pengolahan Ikan di Desa Tlontoraja.....	96
Gambar 4.13 Pengolahan Ikan di Desa Bindang, Desa Sotabar dan Desa Tlontoraja.....	96
Gambar 4.14 Pasar Desa Tlontoraja.....	97
Gambar 4.15 Aktivitas Pasar Desa Tlontoraja.....	97
Gambar 4.16 Aktivitas Nelayan Pesisir Pasean Desa Tlontoraja....	98
Tabel 4.13 Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan menurut Desa.....	100
Gambar 4.19 Matriks Importance-Performance Analysis Pesisir Pasean.....	109
Gambar 4.20 Urutan Infrastruktur Berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hal – hal yang diperhatikan dari teori perkembangan wilayah dan pesisir	19
Tabel 2.2 Penggolongan Infrastruktur oleh Grig 1988; Grigg & Fontane, 2008.....	26
Tabel 2.3 Komponen Infrastruktur.....	29
Tabel 2.4 Simpulan pustaka pada penelitian sebelumnya	33
Tabel 2.5 Indikator dan variabel komponen infrastruktur bagi pengembangan wilayah pesisir secara umum.....	37
Tabel 2.6 Indikator dan variabel penelitian.....	41
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional	46
Tabel 3.2 Pengelompokan Stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan.....	51
Table 3.3 Responden Penelitian	53
Tabel 3.4 Data dan Perolehan Data Primer	58
Tabel 3.5 Data dan Perolehan Data Sekunder.....	60
Tabel 3.6 Skala Pengukuran Likert.....	62
Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin....	75
Tabel 4.2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Dan <i>Jenis Permukaan Jalan</i>	79
Tabel 4.3 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Desa dan Jenisnya.....	81
Tabel 4.4 Banyaknya Kendaraan Tidak Bermotor Menurut Desa dan Jenisnya.....	81
<i>Tabel 4.5 Banyaknya Sarana Angkutan Laut Menurut Desa dan Jenisnya</i>	82
Tabel 4.6 Banyaknya Sarana Pendukung Angkutan Menurut Desa dan Jenisnya.....	82
Tabel 4.7 Banyaknya Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama.....	83
<i>Tabel 4.8 Banyaknya Sarana Air Bersih Menurut Desa dan Jenis Sarana</i>	84
<i>Tabel 4.9 Banyaknya Rumah Tangga Menggunakan PLN</i>	84
Tabel 4.10 Banyaknya Sarana Komunikasi Menurut Desa dan Jenisnya.....	85

Tabel 4.11 Banyaknya Lembaga Keuangan Menurut Desa Jenisnya	94
Tabel 4.12 Rumah Tangga Perikanan Laut Menurut Desa dan Jenis Sarana	98
Tabel 4.13 Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan menurut Desa	99
<i>Tabel 4.14 Identifikasi Kondisi Eksisting di Pesisir Pasean</i>	101
Tabel 4.15 Nilai Tingkat Kepentingan Dan Kinerja nfrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	107
<i>Tabel 4.16 Arahan Pengembangan Infrastruktur berdasarkan Peran dan Fungsi Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan</i>	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infrastruktur memiliki peran yang sangat luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Peran ini tentunya akan mengalami perbedaan untuk tiap jenis infrastruktur khususnya besaran pengaruhnya yang disebabkan oleh beragamnya fungsi infrastruktur dalam setiap konteks. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal *productivity of private capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi (Gie dalam Haris, 2009).

Infrastruktur sebagai prasarana jaringan dasar dari keberadaan suatu kota atau wilayah merupakan faktor penting di dalam keberlangsungan dan pertumbuhan kota atau wilayah (*Grigg dalam Kodoatie, 2003*). Apabila dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur tidak dilakukan dengan baik, maka jaringan kota atau simpul kegiatan perkotaan di dalam suatu wilayah menjadi terganggu, yang selanjutnya berdampak kepada degradasi sistem ekonomi dan sosial masyarakat (*Kodoatie, 2003*).

Kemudian peran infrastruktur cukup signifikan dalam mengakselerasikan pembangunan ekonomi wilayah secara umum. Beberapa terminologi infrastruktur menjangkau hal yang lebih luas, misalnya *The World Bank* (1994) memberikan batasan infrastruktur

terbagi atas infrastruktur ekonomi berupa *public utilities* (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi dan gas), *public work* (jalan, bendungan, jembatan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (rel kereta api, terminal bus, pelabuhan, bandar udara), infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi, serta infrastruktur administrasi berupa penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Perencanaan wilayah adalah sebuah konsep yang menyatu dengan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya aplikasi kerangka teori dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang terdapat didalamnya, dengan pertimbangan aspek wilayah yang memadukan aspek sosial dan lingkungan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan (Dahuri, 2004). Dalam menganalisis perkembangan wilayah sering dihadapi faktor – faktor yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang dilakukan secara bijaksana dapat mempertemukan saling ketergantungan antara pelestarian dan kebutuhan pembangunan.

Wilayah pesisir (*coastal area*) merupakan suatu ekosistem yang khas dan menyimpan banyak potensi. Potensi yang biasanya dimanfaatkan sebagai pariwisata, industri, pelabuhan, perikanan, permukiman, dan sebagainya. Wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan tempat tinggal yang penting bagi manusia dan segala aktivitasnya. Pada awal tahun 1990, diperkirakan 50-70% penduduk dunia tinggal di daerah pesisir, dan pada akhir abad ke 20, lebih dari tiga perempat penduduk dunia akan tinggal di daerah pesisir (Kodoatie dan Sjarief, 2010).

Menurut RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan termasuk dalam PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kawasan perkotaan yang telah diklasifikasikan sebagai PKW memiliki fungsi pelayanan

dalam lingkup provinsi atau beberapa kabupaten. Sedangkan dalam arahan pengembangan kawasan pesisir, Kabupaten Pamekasan diarahkan untuk mengembangkan prasarana dan sarana penunjang aksesibilitas antar kawasan pesisir di Provinsi Jawa Timur, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada kawasan pesisir.

Untuk pusat kegiatan wilayah yang sudah tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, kebutuhan pembangunan khususnya infrastruktur yang ada di Kabupaten Pamekasan seharusnya terpenuhi sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada untuk menunjang aksesibilitas perekonomian Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Pasean juga merupakan kawasan pengembangan wilayah pesisir (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2029). Selain itu dalam kebijakan umum rencana sistem perkotaan (*urban system*) RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032, Kecamatan Pasean merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Pengembangan Kawasan, Kecamatan Pasean memiliki komoditas unggulan dari sektor perikanan. Komoditas unggulan tersebut adalah ikan tongkol dan bandeng. Kecamatan Pasean juga dikenal sebagai daerah pemasok ikan untuk Kabupaten Pamekasan. (Masterplan Pengembangan Kawasan Strategis Pelabuhan Pasean Tahun 2012).

Kegiatan perikanan di kecamatan ini dilengkapi dengan ketersediaan Tempat Pengelolaan Ikan (TPI) di desa Tlontoraja. Akan tetapi tersedianya prasarana TPI ini belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dikarenakan akses menuju prasarana TPI kurang memadai yang pernah diteliti oleh Riezky A.T tahun 2013 seperti prasarana jalan aspal yang rendah yaitu 13,05 km baik, 12,8 rusak ringan dan 7,5 km rusak berat dari 33.350 km panjang jalan, sarana transportasi yang rendah yaitu 1 terminal, 8 pangkalan ojek dan 3 pelabuhan laut serta air bersih dalam kategori rendah, dan media

informasi yang rendah. Dalam hal ini Bapak Suhartono selaku bapak camat Kecamatan Pasean pada tahun 2015 yang juga mengatakan bahwa kondisi jalan menuju TPI dinilai buruk atau rusak sehingga Pak Suhartono menilai hal ini menghambat fungsi TPI di Kecamatan Pasean.

Berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Wilayah Jawa Timur, arahan indikasi pemanfaatan zonasi pada Kabupaten Pamekasan diarahkan kepada kegiatan pengembangan industri garam, pelayanan PKW, pengembangan pelabuhan pengumpul, pengembangan energi listrik baru, pengembangan pertanian pesisir, dan pengembangan perikanan budidaya tambak. Sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Pamekasan, pesisir Kecamatan Pasean dikembangkan kearah Rencana Pembangunan Terminal Tipe C, pelabuhan pengumpul, pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya tambak garam, budidaya rumput laut, sarana penangkapan nelayan, sentra industri budaya, dan pengolahan ikan, dan pengembangan usaha perikanan budidaya.

Pengembangan Pesisir Pasean harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang cukup dan memadai akan menjadi dasar pembangunan agar semua program pengembangan wilayah pesisir ini optimal. Pada kenyataannya infrastruktur yang ada di Kecamatan Pasean ini masih belum cukup memadai. Menurut Masterplan Pengembangan Kawasan Strategis Pelabuhan Pasean Tahun 2012 terdapat permasalahan antara lain tingkat perekonomian masyarakat masih rendah, tidak terjangkaunya seluruh masyarakat dengan air bersih, masih sering terjadi abrasi pantai akibat drainase belum permanen, persampahan yang masih belum tersebar serta kondisi jaringan jalan yang masih belum baik.

Sebagai penunjang pemasaran hasil produksi di Kecamatan Pasean telah dibangun dermaga di Desa Batu Kerbuy yang merupakan bantuan dari Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi dermaga yang

merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini belum berfungsi secara operasional. Permasalahan utama infrastruktur di Kecamatan Pasean adalah kondisi jalan kabupaten yang kurang lebar sebagai akses utama menuju Kabupaten Sumenep (Masterplan kawasan agropolitan Kabupaten Pamekasan, 2014). Selain permasalahan dari segi infrastruktur jalan, Kecamatan Pasean juga memiliki permasalahan pada beberapa desa dan dusun yang merupakan wilayah rawan kekeringan. Di samping itu, tidak tersedianya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan tersebut sehingga membuat perjalanan di malam hari menjadi sangat beresiko.

Dari permasalahan infrastruktur yang ada di Kecamatan Pasean, perlu upaya pengembangan infrastruktur wilayah pesisir supaya pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir bisa optimal dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi untuk menunjang aksesibilitas antar kawasan pesisir di daerah Kabupaten Pamekasan dan Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Pamekasan diarahkan untuk mengembangkan prasarana dan sarana penunjang aksesibilitas antar kawasan pesisir di Provinsi Jawa Timur serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada kawasan pesisir.

Kecamatan Pasean merupakan kawasan pesisir yang memiliki komoditas unggulan dari sektor perikanan. Kecamatan Pasean juga merupakan penghasil petis dengan kualitas terbaik se-Kabupaten Pamekasan. Disamping itu, Kecamatan Pasean juga terdapat pasar yang ada di Desa Tlontoraja. Keberadaan pasar ini kurang ditunjang dengan akses jalan yang baik, khususnya akses jalan yang menghubungkan pasar dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan

sentra home industri pindang dan petis (Masterplan kawasan agropolitan Kabupaten Pamekasan, 2014).

Pengembangan infrastruktur wilayah pesisir akan efektif apabila memanfaatkan potensi yang dimiliki sebagai basis pengembangan. Kecamatan Pasean memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang perlu didukung oleh Kecamatan Pasean sebagai wilayah yang memberikan pengaruh eksternal dalam mendukung pusat kegiatan wilayah serta sebagai pusat pelayanan kawasan. Salah satu bentuk dukungan yaitu penyediaan infrastruktur wilayah pesisir yang masih perlu untuk dilakukan pengembangan maupun peningkatan dalam mencapai tujuan pengembangan infrastruktur. Oleh karena itu, dalam melakukan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir, diperlukan pertimbangan dari beberapa pihak yang terlibat untuk menentukan arahan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Pasean. Disamping itu tingkat ketersediaan dari sebagian besar infrastruktur masih belum optimal sehingga diperlukan upaya pengembangan infrastruktur bagi pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Pasean.

Adapun rumusan permasalahan lebih terperinci yang kemudian menjadi pertanyaan penelitian ini adalah : “Infrastruktur pesisir apa yang harus dikembangkan di wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan untuk mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa?”.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Untuk mewujudkan hal tersebut, sasaran studi pada penelitian ini yaitu:

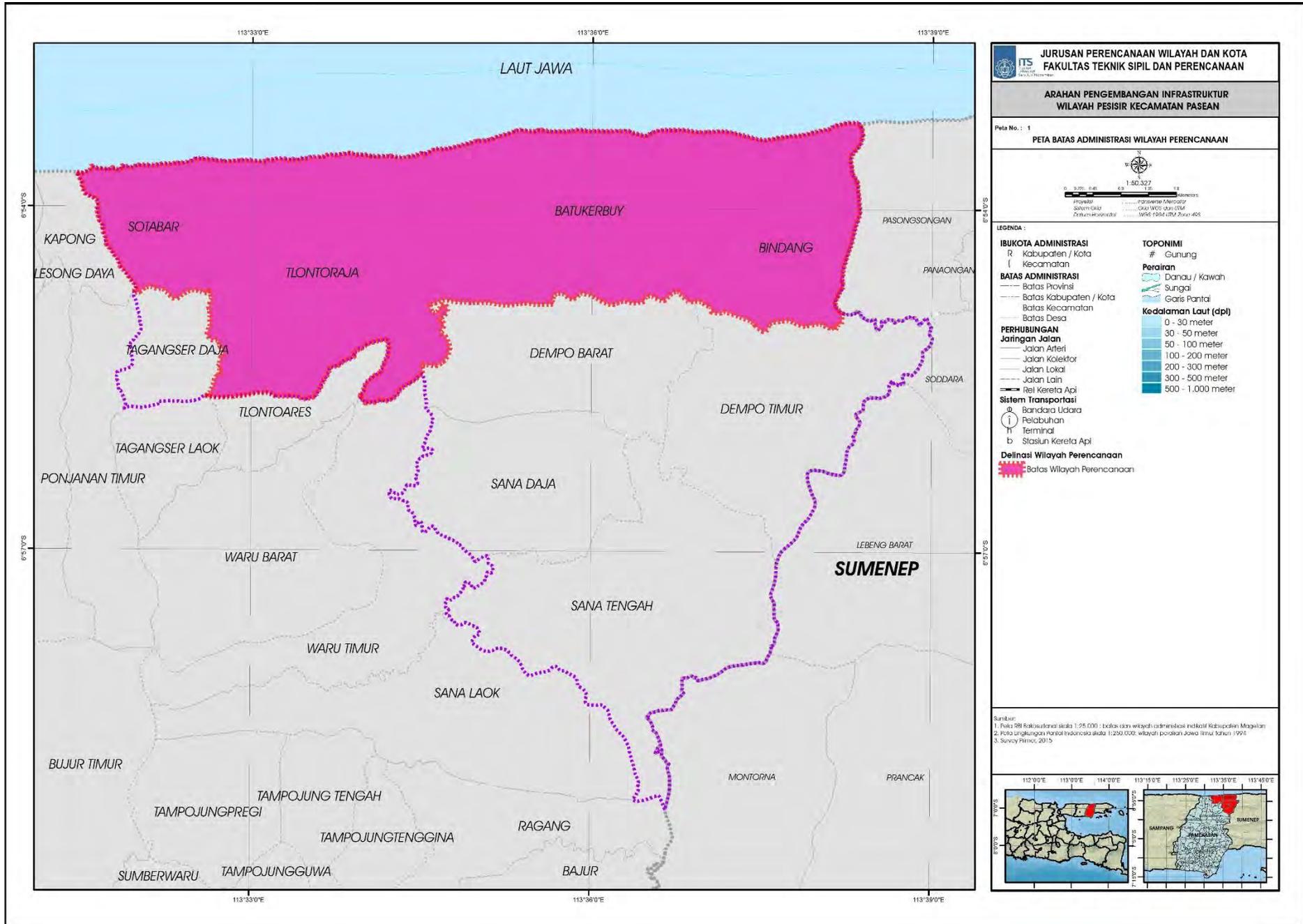
1. Mengidentifikasi kondisi eksisting infrastruktur di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

2. Menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja infrastruktur wilayah pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan
3. Merumuskan arahan pengembangan infrastruktur berdasarkan peran dan fungsi wilayah pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup wilayah

Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri, dkk, 2000), kawasan yang ke arah darat masih mendapat pengaruh sifat-sifat dari lautan dan ke arah laut masih mendapat pengaruh sifat dari daratan sehingga batasan kawasan pesisir sulit untuk digambarkan. Untuk mempermudah pembahasan dalam studi ini, wilayah yang menjadi lokasi studi terdiri dari empat desa yang berbatasan langsung dengan bibir pantai, yaitu Desa Sotabar, Desa Tlontoraja, Desa Batukerbuy dan Desa Bindang. Keempat desa tersebut berada di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.



“halaman ini sengaja dikosongkan”

1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini akan membahas mengenai peran penting infrastruktur bagi pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Pasean khususnya pada sektor perikanan dan perdagangan jasa. Hal ini menjadi dasar untuk membuat arahan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir di Kecamatan Pasean.

1.4.3 Ruang Lingkup Substansi

Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur terkait dengan infrastruktur, pengembangan wilayah, pesisir, minapolitan dan metode-metode penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Memberikan arahan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir yang tepat untuk kawasan pesisir di Kecamatan Pasean berdasarkan potensi sumberdaya pesisir di Kecamatan Pasean
2. Memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan terkait dengan hasil penelitian sebagai acuan RTRW selanjutnya untuk mengembangkan infrastruktur wilayah pesisir khususnya kawasan pesisir pantai utara di Kecamatan Pasean.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri atas enam bab pembahasan, yaitu:

- **BAB I – Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

- **BAB II - Tinjauan Pustaka**

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan atau dijadikan pedoman dalam melakukan proses analisa dalam mencapai tujuan penelitian dimana teori-teori yang diuraikan mengenai infrastruktur dan pengembangan wilayah pesisir.

- **BAB III - Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian terutama dalam melakukan analisa, teknik pengumpulan data serta tahapan analisa yang digunakan dalam penelitian.

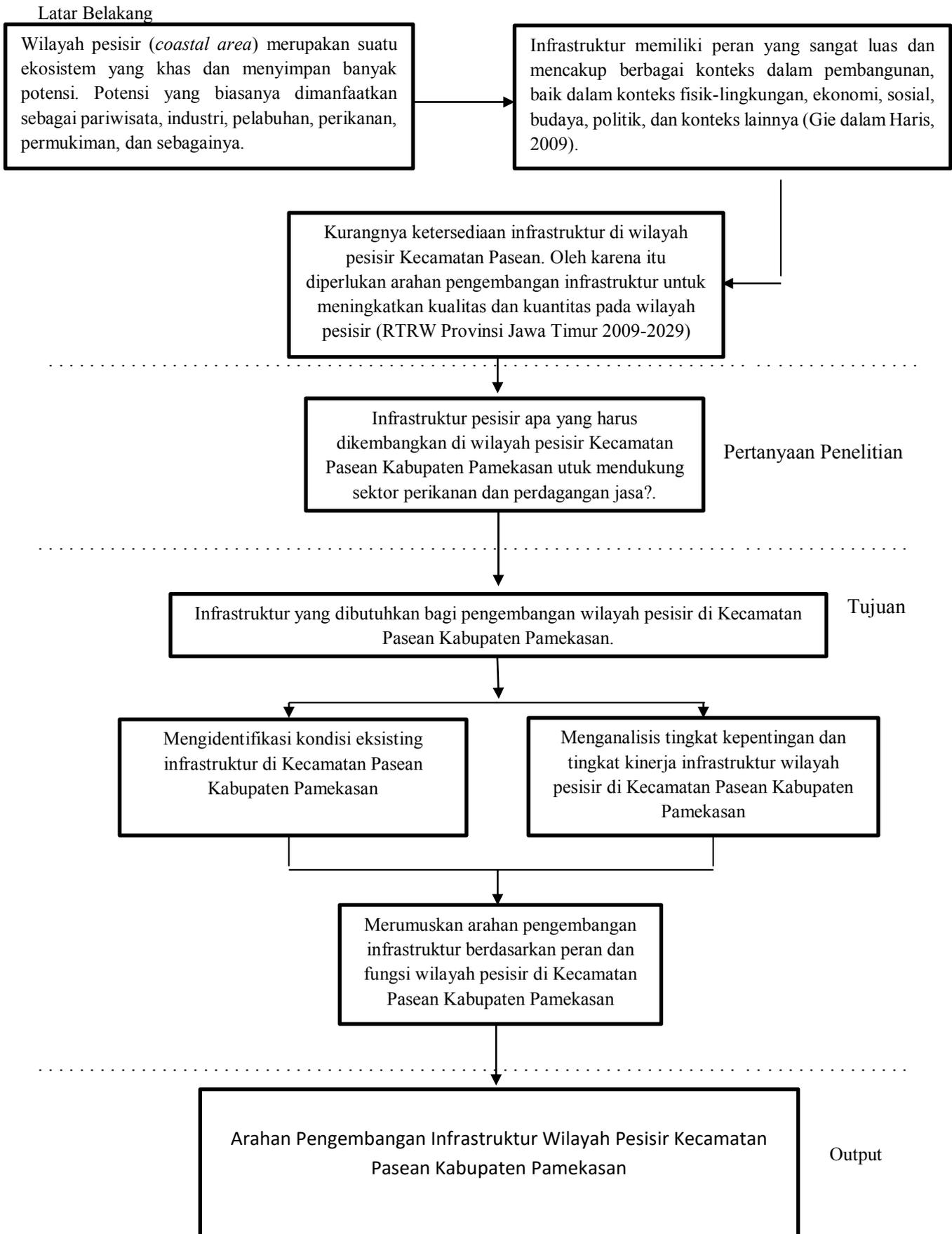
- **BAB IV – Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan kondisi eksisting wilayah studi dan pembahasan hasil analisa

- **BAB V - Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan penutup dalam laporan penelitian ini. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Serta diberikan rekomendasi penulis mengenai pokok bahasan yang telah dilakukan.

1.7 Kerangka Berpikir



“halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Teori-teori yang dibahas dalam bab ini meliputi pengembangan wilayah pesisir, infrastruktur dan minapolitan.

2.1 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah mengandung arti yang luas, tetapi pada prinsipnya merupakan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di suatu wilayah tertentu. Tujuan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan. Di sisi sosial ekonomis, pengembangan wilayah adalah upaya memberikan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan layanan logistik, dan sebagainya. Di sisi lain, secara ekologis pengembangan wilayah juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai akibat dari campur tangan manusia terhadap lingkungan (Alkadri, dkk, 2003).

Pengembangan suatu wilayah harus berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal, sekaligus mengantisipasi perkembangan eksternal (Bappenas, 2004). Faktor-faktor internal meliputi pola-pola pengembangan SDM, informasi pasar, sumber daya modal dan investasi, kebijakan dalam investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan kemampuan kelembagaan lokal dan pemerintahan, serta berbagai kerjasama dan kemitraan. Sedangkan faktor eksternal meliputi masalah kesenjangan wilayah dan pengembangan kapasitas otonomi daerah, perdagangan bebas, serta otonomi daerah. Pengelolaan pengembangan kawasan andalan pada dasarnya adalah meningkatkan daya saing kawasan dan produk unggulannya.

Strategi untuk mencapai tujuan menjadi wilayah produktif adalah membangun prasarana, mempromosikan kerja sama regional dan meningkatkan partisipasi publik. Prasarana wilayah, yang terdiri

dari jalan, pelabuhan, listrik, dan sambungan internet adalah satu paket kebutuhan yang mutlak untuk membangun wilayah produktif. Membangun dan meningkatkan infrastruktur transportasi, energi, komunikasi dan informasi ini adalah untuk memudahkan kerja sama dan pertukaran barang dan jasa antarwilayah, dan untuk memberikan akses yang merata terhadap fungsi-fungsi pelayanan dari pusat-pusat wilayah (Herry Darwanto, 2003).

2.1.1 Pengembangan Wilayah Pesisir

Wilayah laut dan pesisir adalah wilayah yang amat penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Lebih dari empat belas juta penduduk atau sekitar 7,5% dari total penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan ini (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003). Sekitar 26% dari total Produk Domestik Bruto (*Gross National Product/GDP*) Indonesia disumbangkan dari kegiatan dan sumberdaya laut dan pesisir (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2003).

Wilayah pesisir dan lautan Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani, sejak berabad-abad lamanya. Sementara itu kekayaan hidrokarbon dan mineral lainnya yang terdapat di wilayah ini juga telah dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan permukiman dan tempat pembuangan limbah.

Menurut Dahuri *et al.* (1996), hingga saat ini masih belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus garis pantai (*cross shore*).

Berdasarkan Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tahun 2004, pengertian

wilayah pesisir ialah: “satu kesatuan wilayah antara daratan dan lautan yang secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan yang didalamnya termasuk ekosistem pulau kecil serta perairan di antara satu kesatuan pulau-pulau kecil”.

Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme (Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, 2003).

2.1.2 Pengembangan Wilayah Pesisir berkelanjutan

Budimanta dalam Buletin Penataan Ruang (2009) berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara pandang mengenai suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan pada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Menurut (*Wiyana, 2004*), suatu kegiatan dikatakan keberlanjutan apabila sifat keberlanjutan itu ada pada setiap kegiatan pembangunan, yaitu:

- a. Berkelanjutan secara ekonomi: suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintenance*), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien.
- b. Berkelanjutan secara ekologis: kegiatan pembangunan harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*).
- c. Berkelanjutan secara sosial politik: kegiatan pembangunan yang dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan.

Redclift (1987) dalam Kay and Alder (2005) mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan pandangan yang lebih luas dari segi ekonomi dan ekologi, dibandingkan dengan sebagian besar praktisi dari berbagai disiplin ilmu yang siap untuk diakui, yang disertai dengan jaminan politik untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut ‘berkelanjutan’.

Menurut *Charles (2001) dalam Satria (2009)*, dimensi pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada konsep keberlanjutan adalah sbb:

a. Keberlanjutan ekologis

Diwujudkan melalui kegiatan perikanan yang tanpa merusak lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya pesisirnya tidak melebihi daya dukung lingkungan.

b. Keberlanjutan sosial ekonomi

Diwujudkan dengan tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pesisir

c. Keberlanjutan komunitas

Diwujudkan dengan stabilitas sistem sosial, terjaminnya peran masyarakat dalam pembangunan, dan akses masyarakat pada sumberdaya baik untuk kepentingan pemanfaatan maupun pengelolaan.

d. Keberlanjutan institusi

Merupakan prasyarat bagi tercapainya ketiga dimensi keberlanjutan sebelumnya. Meliputi institusi politik (kapabilitas birokrasi desa), institusi sosial-ekonomi (institusi keuangan desa, pasar, dll), dan institusi sumber daya (institusi pengelola sumberdaya).

Keberlanjutan secara social ekonomi terkait aktivitas masyarakat pesisir yang identik dengan pemanfaatan sumber daya laut sehingga kebutuhan mengenai infrastruktur harus dikaitkan dengan aktivitas pesisir tersebut, seperti Sarana dan prasarana (infrastruktur), meliputi perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, pabrik es, *cold storage*, infrastruktur pada sentra industri,

pengadaan dan penyaluran sarana produksi (seperti BBM, benih, mesin dan alat tangkap, serta sistem informasi tentang teknologi baru dan sistem pengelolaan usaha yang efisien menurut (Wiranto, 2004) merupakan salah satu komponen yang saling berkaitan dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara menyeluruh dan terpadu.

Tabel 2.1 Hal – hal yang diperhatikan dari teori perkembangan wilayah dan pesisir

Perkembangan wilayah	Perkembangan pesisir
<p>Memperhatikan kondisi internal dan eksternal</p> <p>Factor internal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pola-pola pengembangan SDM 2. informasi pasar 3. sumber daya modal dan investasi 4. kebijakan dalam investasi 5. pengembangan infrastruktur 6. pengembangan kemampuan kelembagaan lokal dan pemerintahan 7. berbagai kerjasama dan kemitraan. <p>Factor eksternal meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. masalah kesenjangan wilayah 2. pengembangan kapasitas otonomi daerah 3. perdagangan bebas, 4. Otonomi daerah. 	<p>3 komponen perkembangan pesisir berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Social Ekonomi Diwujudkan dengan tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pesisir • Ekologis Diwujudkan melalui kegiatan perikanan yang tanpa merusak lingkungan • Komunitas stabilitas sistem sosial, terjaminnya peran masyarakat dalam pembangunan, dan akses masyarakat pada sumberdaya • Institusi prasyarat bagi tercapainya ketiga dimensi keberlanjutan sebelumnya
<p>Dalam pengembangan wilayah pengembangan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu penjabaran terkait infrastruktur yang</p>	<p>kebutuhan mengenai infrastruktur harus dikaitkan dengan aktivitas pesisir tersebut, seperti Sarana dan prasarana (infrastruktur), meliputi</p>

berperan penting dalam pengembangan wilayah menurut herry Darwanto 2003 adalah infrastruktur transportasi, energi, komunikasi dan informasi	perencanaan dan penyediaan prasarana perikanan seperti pelabuhan, pabrik es, <i>cold storage</i> , infrastruktur pada sentra industri, pengadaan dan penyaluran sarana produksi (seperti BBM, benih, mesin dan alat tangkap, serta sistem informasi tentang teknologi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : hasil komparasi teori 2015

2.2 Minapolitan

2.2.1 Konsep Minapolitan

Menurut (*Douglas, 1986*) Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan dengan prinsip: integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi. Kawasan Minapolitan adalah kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan perikanan, jasa, perumahan dan kegiatan terkait lainnya.

Konsep minapolitan pada dasarnya adalah konsep pengembangan wilayah dimana konsep ini menitik beratkan pada pengembangan komoditas-komoditas unggulan pada sektor perikanan di suatu wilayah pesisir Dengan kecenderungan kegagalan model pembangunan di suatu daerah yang secara umum menyebabkan perekonomian di daerah tersebut yang tidak berkembang sehingga menyebabkan pembangunan terhambat. Dengan terhambatnya pembangunan di suatu daerah, maka dapat pula menyebabkan daerah tersebut menjadi daerah tertinggal atau menyebabkan disparitas antar wilayah. Dengan begitu model-model pengembangan kemandirian di daerah terus menerus digali. Disini akan tentang bagaimana mengembangkan konsep Minapolitan sebagai pendorong kemandirian pembangunan di daerah.

Indonesia akan mewujudkan program kawasan minapolitan di berbagai daerah. Program ini harus di tunjangan dengan kegiatan yang lain dalam menjaga keberlanjutannya, seperti pengadaan fasilitas, pendampingan, pemberdayaan masyarakat, teknologi, pembiayaan, serta pemasaran produk perikanan dan kelautan. Pengembangan program ini pula harus di dukung dengan pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas dari dan menuju kawasan tersebut. Dengan semua pengembangan minapolitan yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan dan sehingga proses transisi menjadi kawasan minapolitan mandiri dapat terwujud.

Seperti diketahui bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang pada umumnya berada di daerah pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusia juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di daerah perkotaan. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di daerah perkotaan. Bahkan hubungan ekonomi kota dan desa sering eksploitatif, sehingga ekonomi masyarakat di daerah pedesaan sulit berkembang. Hal ini lah yang menyebabkan disparitas antar wilayah terjadi, Dengan konsep Minapolitan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau peluang yang biasanya ada di daerah perkotaan perlu pula dikembangkan di daerah-daerah pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra-sentra produksi. Sebagai sentra produksi, daerah pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana daerah perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai. Pengembangan wilayah dengan menggunakan konsep minapolitan merupakan konsep pengembangan ekonomi suatu daerah dengan menggunakan sektor

perikanan sebagai basis perekonomian, dengan komoditas unggulan daerah masing-masing. Dengan basis pengembangan sektor unggulan sebagai kutub tumbuh kemandirian daerah, maka secara konseptual Minapolitan akan sangat sesuai untuk diterapkan sebagai strategi pengembangan daerah pesisir yang mandiri di Indonesia.

2.2.2 Tujuan Minapolitan

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas
2. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang adil dan merata
3. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah

2.2.3 Karakteristik Minapolitan

1. Terdiri dari sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan dan mempunyai multiplier effect tinggi terhadap perekonomian disekitarnya
2. Mempunyai keanekaragaman kegiatan ekonomi, produksi, perdagangan, jasa pelayanan, kesehatan dan sosial yang saling terkait
3. Mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktifitas ekonomi sebagai layaknya sebuah kota.

2.2.4 Unsur-unsur Minapolitan Secara Konseptual

Secara ringkas Minapolitan dapat didefinisikan sebagai berikut: Minapolitan adalah Konsep Pembangunan Ekonomi Kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi tinggi. Sementara itu, kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.

Dalam perencanaan pengembangan kawasan minapolitan perlu di ketahui terlebih dahulu tentang unsur-unsur apa saja yang masuk dalam pengembangan minapolitan. Seperti kita ketahui tujuan pengembangan kawasan minapolitan adalah untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong keterkaitan desa dan kota dan berkembangnya sistem dan pengembangan wilayah pedesaan sebagai produsen yang berdaya saing tinggi. Hal ini harus di tunjang dengan perencanaan yang berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan Minapolitan.

Untuk itu perlu di mengerti terlebih dahulu tentang unsur-unsur apa yang harus di kembangkan dalam konsep minapolitan. Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu, pertama Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan, kedua, Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.

2.3 Infrastruktur

2.3.1 Definisi Infrastruktur

Menurut MacMillan *Dictionary of Modern Economics* (1996) infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antar pembeli dan penjual. Sedangkan *The Routledge Dictionary of Economics* (2002) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan menyediakan transportasi, kesehatan masyarakat, pelayanan pendidikan dan bangunan untuk kegiatan masyarakat serta fasilitas pendukung lainnya.

Menurut *Grigg* 1988, infrastruktur pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (*Grigg*, 2000).

Dalam *American Public Works Association* (*Stone*, 1974 dalam *Yuki*, 2008), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas pihak yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen public untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Definisi teknik juga merupakan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Kelompok Bidang Keahlian Manajemen Rekayasa Konstruksi ITB (2001) menyatakan bahwa *infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat atau komunitas.*

2.3.2 Peran Infrastruktur

Salah satu konsep pola pikir, di bawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur. Diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran yang didukung oleh sistem ekonomi. Hubungan antar sistem dalam peran infrastruktur disajikan pada **Gambar 2.1**



Gambar 2.1 Hubungan antara sistem sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan alam yang harmoni (Grig, 1988)

Penjelasan mengenai skema keterkaitan peran infrastruktur pada gambar 2.1 diatas juga didukung pernyataan *Acheson dalam Mulyadi (2005)*, yang menyatakan bahwa karakteristik ekonomi masyarakat pesisir bergantung pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial di sekitarnya yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian dalam proses kegiatan ekonominya dalam memanfaatkan sumberdaya alam (terutama laut dan pesisir)

Berdasarkan karakteristik ekonominya, masyarakat pesisir tidak hanya berupa kegiatan melaut (nelayan), melainkan juga sebagai pembudidaya ikan, pengolah ikan, bahkan pedagang ikan (*Satria, 2004*). Dari karakteristiknya, infrastruktur yang paling berperan adalah infrastruktur yang berkaitan dengan karakteristik aktivitas ekonomi tersebut seperti pelelangan ikan guna pemasaran hasil perikanan dan kebutuhan – kebutuhan pembentukan industri pengolahan ikan seperti koperasi unit desa, tempat pengawetan ikan dll.

2.3.3 Penggolongan Infrastruktur

Komponen infrastruktur merupakan bagian-bagian dari infrastruktur yang dianggap memiliki peran penting terhadap perekonomian dan sosial. Dalam *World Development Report (1994)* infrastruktur terdiri dari:

1. Prasarana Umum: Listrik, telekomunikasi, pipa air bersih, sanitasi dan sistem pembuangan, pembuangan dan pengumpulan limbah padat dan pipa gas.
2. Infrastruktur Umum: Jalan, bendungan utama, dan kanal untuk

irigasi dan drainase.

3. Sektor Transportasi : Jalur kereta api, Pelabuhan, Bandara Udara dan Jalur Air.

Sedangkan menurut Grig, 1988 dan Fontane, 2008 dalam Pengantar Manajemen Infrastruktur, penggolongan infrastruktur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penggolongan Infrastruktur oleh Grig 1988; Grigg & Fontane, 2008)

No.	Grup/Golongan	Infrastruktur
1.	Transportasi	jalan, jalan raya, jembatan
2.	Pelayanan transportasi	transit, bandara, pelabuhan
3.	Komunikasi	
4.	Keairan	air, air buangan, sistem keairan, termasuk jalan air yaitu sungai, saluran terbuka, pipa
5.	Pengelolaan limbah	sistem pengelolaan limbah padat
6.	Bangunan	
7.	Distribusi dan produksi energi	listrik dan gas

Sumber : Kondoatie, 2005

Akatsuka dan Yoshida (1999) dalam Delis (2008) juga memandang infrastruktur dasar berupa transportasi, energi, dan telekomunikasi sebagai barang publik. Ketiganya dipertimbangkan sebagai *social overhead capital* dan berperan sebagai pondasi bagi aktivitas-aktivitas ekonomi dan industri. Lebih jauh dikemukakan bahwa *social overhead capital* mencakup:

1. Kapital yang berfungsi secara tidak langsung untuk meningkatkan kapasitas produksi bagi capital produktif. Ini berbeda dengan capital produktif yang berperan langsung sebagai penentu kapasitas produksi.
2. Kapital yang fungsinya esensial bagi kesehatan masyarakat, tetapi

penyediaanya tidak selalu dapat dilakukan melalui mekanisme pasar karena karakteristiknya yang dapat dikonsumsi secara kolektif atau tidak dapat dikecualikan

3. Kapital yang diharapkan disediakan oleh entitas publik, bukan perusahaan swasta.

Social overhead capital dipertimbangkan sebagai pelayanan khusus yang dapat disuplai secara eksklusif dalam mana manfaatnya bagi wilayah atau masyarakat lebih besar dari pada pengguna individu (*external economy*). Sebagai alternative, *social overhead capital* dapat dipandang sebagai pondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara lebih baik, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Manfaat penyediaan infrastruktur terhadap peningkatan pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan perlindungan lingkungan hidup, hanya dapat terjadi apabila infrastruktur dapat merespon permintaan efektif dengan menyediakan pelayanan efisien (Delis, 2008). Pelayanan yang efisien kepada pengguna, baik konsumen maupun produsen, merupakan sasaran aktual dari penyediaan infrastruktur atau sebagai ukuran utama dari keberhasilan penyediaan infrastruktur.

Hyman (1996) dalam Delis (2008) juga memandang infrastruktur sebagai barang capital dengan menekankan pada aspek fisiknya, yaitu dimana infrastruktur negara adalah transportasi dan kapital lingkungan yang terdiri dari sekolah, listrik, jaringan komunikasi dan sistem kesehatan. Menurut Hudson, Haas dan Udin (1997) yang dikutip dari Jurnal Binapraja tahun 2009, kategori fasilitas infrastruktur adalah transportasi, air dan sanitasi, pengelolaan limbah, produksi dan distribusi energi, bangunan gedung, fasilitas rekreasi dan komunikasi.

Selain itu ada yang membagi infrastruktur menjadi infrastruktur dasar dan pelengkap (Jan Jacobs, et al, 1999 dalam Sibarani 2002):

- Infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) meliputi sektor-sektor yang memunya karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*nontradable*) dan tidak dapat dipisahkan baik secara teknis maupun spasial. Seperti jalan raya,

kereta api, kanal, pelabuhan laut, drainase, bendungan dan sebagainya.

- Infrastruktur pelengkap (*complementary infrastructure*) seperti gas, listrik, telepon dan pengadaan air minum.

Namun penggolongan ini dapat berubah menurut waktu, seperti halnya dengan listrik, dulunya digolongkan sebagai infrastuktur pelengkap, sekarang digolongkan sebagai infrastuktur dasar (Sibarani, 2002).

Berdasarkan teori-teori yang diungkapkan oleh beberapa sumber diatas, komponen infrastruktur dapat disimpulkan pada **Tabel 2.3** berikut:

Tabel 2.3
Komponen Infrastruktur

World Bank (1994)	Grig 1988; Grigg & Fontane, 2008	Akatsuka dan Yoshida (1999)	Hyman (1996) dalam Delis (2008)	Hudson, Haas dan Udin (1997)	Jan Jacobs, et al, (1999)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Listrik 2. Telekomunikasi 3. Pipa Air Bersih 4. Sanitasi 5. Sistem Pembuangan limbah padat 6. Pipa Gas 7. Jalan 8. Bendungan utama 9. Irigasi dan drainase (kanal) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan, jalan raya, jembatan 2. transit, bandara, pelabuhan 3. Komunikasi 4. Sistem keairan, 5. Air buangan 6. Sungai, saluran terbuka 7. Sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi 2. Energi 3. Telekomunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi 2. Sekolah 3. Listrik, 4. Jaringan komunikasi 5. Sistem kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi 2. Air 3. Sanitasi 4. Pengelolaan limbah, 5. Energi 6. Bangunan 7. Fasilitas rekreasi 8. Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan raya 2. Kereta api 3. Kanal 4. Pelabuhan laut, 5. Drainase, 6. Bendungan 7. Gas, 8. Listrik, 9. Telepon 10. Pengadaan air minum.

World Bank (1994)	Grig 1988; Grigg & Fontane, 2008	Akatsuka dan Yoshida (1999)	Hyman (1996) dalam Delis (2008)	Hudson, Haas dan Udin (1997)	Jan Jacobs, et al, (1999)
10. Jalur kereta api, Pelabuhan, Bandar Udara 11. Jalur air	pengelolaa n limbah padat 8. Bangunan 9. Listrik dan gas				

Sumber: Hasil komparasi teori, 2015

2.4 Kebijakan Terkait Wilayah Penelitian

Beberapa kebijakan terkait infrastruktur pada wilayah penelitian berdasarkan RTRW Kabupaten Pamekasan tahun 2010-2030 adalah meliputi :

1. Pengembangan jalur jalan melintasi kecamatan pasean
2. Rencana pembangunan Terminal tipe C
3. Rencana pengembangan trayek angkutan umum Pegantenan – Batumarmar – Pasean.
4. Dermaga penyeberangan lintas antar provinsi meliputi pelabuhan di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani transportasi laut dari Kabupaten Pamekasan ke Wilayah Kalimantan
5. Pelabuhan pengumpul yang berfungsi sebagai pengumpul di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean untuk melayani transportasi laut dari Kabupaten Pamekasan ke Wilayah Kalimantan.
6. Pembangunan dan perbaikan saluran irigasi
7. Pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih.
8. Rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
9. Penetapan kawasan strategis berupa kawasan Perdagangan, Jasa, Industri dan Pergudangan serta kawasan industri

2.5 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Konsep dan teori-teori di atas, telah banyak digunakan sebagai pembuktian adanya pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam studi yang dilakukan oleh Ir. A. Hermanto Dardak pada Makalah Utama “*Pengembangan Jaringan Jalan Wilayah Sumatera Berbasis Penataan Ruang*”, fungsi infrastruktur terutama prasarana jalan adalah sebagai prasarana distribusi lalu lintas barang dan manusia secara langsung berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, berkembangannya kehidupan sosial – budaya maupun lingkungan. Dalam studi tersebut mengatakan bahwa wujud keterpaduan antar sektor untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih merata dan adil adalah keterpaduan pembangunan jaringan jalan dan

pemantapan kinerja pelayanan prasarana jalan terbangun melalui pemeliharaan, rehabilitasi, pembangunan ruas jalan untuk memfungsikan sistem jaringan dan mempertahankan tingkat pelayanan dan kualitas jalan.

Selain itu, terdapat pula penelitian Tonny Judiantono yang tercantum pada Jurnal PS PWK UNISBA 2009, menyimpulkan bahwa kebijakan peningkatan mobilitas transportasi di Jawa Barat Periode 1999-2004 memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah kendaraan tapi tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang seimbang. Kondisi seperti itu memunculkan efek eksternalitas yang cenderung berdampak negatif, salah satunya adalah dampak negatif pada keuangan daerah yaitu dengan meningkatnya belanja sektor transportasi, khususnya pada biaya pemeliharaan jalan, yang ditunjukkan dengan rendahnya penambahan panjang jaringan jalan.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (1998) meneliti adanya perbedaan yang signifikan dari margin perdagangan untuk daerah yang memiliki kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang infrastrukturnya tergolong buruk. Sibarani (2002) dalam penelitiannya mengenai kontribusi infrastruktur (jalan, listrik dan telepon) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menganalisis bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di pulau Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB) menimbulkan disparitas pendapatan perkapita di masing-masing daerah di Indonesia, terutama antara pulau Jawa dengan luar Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB) dengan Indonesia bagian timur (IBT), meskipun pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi meningkat.

Selanjutnya, pada penelitian Setiadi (2006) yang meneliti kaitan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di delapan propinsi di Pulau Sumatera menemukan bahwa setiap jenis infrastruktur (jalan, listrik dan telepon) secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan output perekonomian daerah, meskipun masing-masing infrastruktur memberikan kontribusi yang berbeda. Penelitian tersebut sama dengan **pendapat Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar dalam peluncuran buku “BUMN Membangun Bangsa”** (www.vivanews.com : Jum'at, 30 Oktober 2009, 09:15

WIB), yang menyatakan pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh penambahan kapasitas listrik. Kapasitas listrik adalah daya listrik terpasang.

Selain, jalan/sistem transportasi, listrik dan telepon, pada penelitian Taufiq (2006) tertera bahwa di Indonesiatingkat kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan air bersih secara kontinu terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimana peningkatan rata-rata penggunaan air bersih sebesar 7,31%. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur air bersih merupakan salah satu prioritas dari pengeluaran pembangunan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Mengikuti studi yang dilakukan oleh Iwan Nugroho dalam Majalah PP Tahun 2002 Edisi ke 26, tertera bahwa PDRB Jawa Timur tahun 1999, share sektor air bersih relative kecil yaitu 0,17% atau dalam nilai absolut sebesar 254 miliar rupiah. Rendahnya nilai tambah tersebut memerlukan upaya pengembangan atau injeksi investasi dalam pembangunan sektor air bersih. Menurut Iwan Nugroho, pengembangan atau injeksi investasi pembangunan sektor air bersih yang dapat meningkatkan peran ekonomi wilayah adalah manajemen, distribusi pelayanan air bersih.

Kementerian Pekerjaan Umum R.I, Dr.Ir. Mohamad Amron, MSc. pada peresmian pembangunan Jaringan Air Baku Telaga Gede yang terletak di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang yang dimana dikutip dalam Situs Resmi Setda Kabupaten Pemalang (www.pemalangkab.go.id pada Selasa, 29 Maret 2011 - 20:18:58 WIB) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah didasari oleh kapasitas ketersediaan air bersih.

Berikut **Tabel 2.4** adalah penyederhanaan teori yang berdasarkan sumber-sumber dari tinjauan penelitian sebelumnya:

Tabel 2.4

Simpulan pustaka pada penelitian sebelumnya

No	Referensi	Tinjauan Pustaka	Simpulan
1.	Ir. A. Hermanto Dardak pada Makalah Utama “Pengembangan	Fungsi infrastruktur terutama prasarana jalan adalah sebagai prasarana distribusi	Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya,

	<i>Jaringan Jalan Wilayah Sumatera Berbasis Penataan Ruang</i> ”,	lalu lintas barang dan manusia secara langsung berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, berkembangannya kehidupan sosial – budaya maupun lingkungan	infrastruktur yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia terdiri
2.	Tonny Judiantono (2009)	Kebijakan peningkatan mobilitas transportasi di Jawa Barat Periode 1999-2004 memberikan dampak positif pada peningkatan jumlah kendaraan tapi tidak diimbangi dengan penambahan panjang jalan yang seimbang	
3.	Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (1998)	Meneliti adanya perbedaan yang signifikan dari margin perdagangan untuk daerah yang memiliki kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah yang infrastrukturnya tergolong buruk.	

4.	Sibarani (2002)	<p>Dalam penelitiannya mengenai kontribusi infrastruktur (jalan, listrik dan telepon) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menganalisis bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di pulau Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB) menimbulkan disparitas pendapatan perkapita di masing-masing daerah di Indonesia, terutama antara pulau Jawa dengan luar Jawa dan Indonesia Bagian Barat (IBB) dengan Indonesia bagian timur (IBT), meskipun pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi meningkat.</p>	<p>dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan atau Transportasi 2. Listrik 3. Air bersih
5.	Setiadi (2006)	<p>Kaitan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di delapan propinsi di Pulau Sumatera menemukan bahwa setiap jenis infrastruktur (jalan,</p>	

		listrik dan telepon) secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan output perekonomian daerah, meskipun masing-masing infrastruktur memberikan kontribusi yang berbeda.	
6.	Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (2009)	Menyatakan pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh penambahan kapasitas listrik. Kapasitas listrik adalah daya listrik terpasang.	
7.	Taufiq (2006)	Tertera bahwa di Indonesiatingkat kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan air bersih secara kontinu terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimana peningkatan rata-rata penggunaan air bersih sebesar 7,31%. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur air bersih merupakan salah satu prioritas dari	

		pengeluaran pembangunan dari pemerintah daerah yang bersangkutan.	
8.	Iwan Nugroho (1999)	Pengembangan atau injeksi investasi pembangunan sektor air bersih yang dapat meningkatkan peran ekonomi wilayah adalah manajemen, distribusi pelayanan air bersih.	
9.	Kementerian Pekerjaan Umum R.I, Dr.Ir. Mohamad Amron, MSc (2011)	Menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah didasari oleh kapasitas ketersediaan air bersih.	

Hasil simpulan komparasi teori pustaka, 2015

2.6 Sintesa Pustaka

Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas pihak yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Dalam penelitian ini, infrastruktur merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan wilayah pesisir yang tidak dapat lepas dari perannya.

Tabel 2.5
Indikator dan variabel komponen infrastruktur bagi
pengembangan wilayah pesisir secara umum

Sumber	Indikator	Variabel
Herry Darwanto, 2003	Transportasi	Jalan
		Pelabuhan
	Energi	Listrik
	Telekomunikasi	Sambungan internet
Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, 2003	Transportasi	Transportasi
		Pelabuhan
	Bangunan	Rekreasi
		Pariwisata
		Kawasan permukiman
	Pengelolaan Limbah	Pembuangan limbah
	Infrastruktur perekonomian	Kawasan industri
		Agribisnis
Agroindustri		
Wiranto, 2004	Transportasi	Pelabuhan
	Infrastruktur penunjang	Pabrik es
		<i>Cold storage</i>
		Pengadaan dan sarana produksi (seperti BBM, benih, mesin dan alat tangkap)
	Infrastruktur perekonomian	Infrastruktur pada sentra industri
	Telekomunikasi	Sistem informasi tentang teknologi baru
Pengelolaan limbah	Sistem pengelolaan usaha yang efisien.	
<i>The Routledge Dictionary of</i>	Transportasi	Transportasi
	Bangunan	Kesehatan masyarakat
		Pelayanan pendidikan

Sumber	Indikator	Variabel
<i>Economics</i> (2002)		Bangunan untuk kegiatan masyarakat serta fasilitas pendukung lainnya
<i>Grigg</i> 1988	Transportasi	Transportasi
	Keairan	Pengairan
	Kanal	Drainase
	Bangunan	Bangunan untuk kegiatan masyarakat Fasilitas pendukung lainnya
<i>American Public Works Association</i> (<i>Stone</i> , 1974 dalam <i>Yuki</i> , 2008)	Transportasi	Transportasi
	Keairan	Penyediaan air
	Energi	Tenaga listrik
	Pengelolaan limbah	Pembuangan limbah
	-	Pelayanan-pelayanan similiar
<i>World Development Report</i> (1994)	Energi	Listrik
		Pipa gas
	Telekomunikasi	Telekomunikasi
	Keairan	Pipa air bersih
		Bendungan utama
	Pengelolaan limbah padat	Sanitasi dan sistem pembuangan
		Pembuangan dan pengumpulan limbah limbah padat
	Transportasi	Jalur kereta api
		Jalan
		Pelabuhan
Bandara udara		
	Jalur air	
Kanal	Irigasi dan drainase	
	Transportasi	Jalan

Sumber	Indikator	Variabel
<i>Grigg</i> 1988 dan <i>Fontane</i> , 2008 dalam Pengantar Manajemen Infrastruktur		Jalan raya
		Jembatan
		Transit
		Bandara
		Pelabuhan
	Keairan	Air
		Sistem keairan
		Pipa
	Pengelolaan limbah	Air buangan
		Sistem pengolahan limbah padat
	Kanal	Sungai
		Saluran terbuka
	Energi	Listrik
Gas		
Akatsuka dan Yoshida (1999) dalam Delis (2008)	Transportasi	Transportasi
	Energi	Energi
	Telekomunikasi	Telekomunikasi
<i>Hyman</i> (1996) dalam Delis (2008)	Transportasi	Transportasi
	Telekomunikasi	Jaringan komunikasi
	Energi	Listrik
	Bangunan	Sistem kesehatan
		Sekolah
<i>Hudson, Haas</i> dan <i>Udin</i> (1997) yang dikutip dari <i>Jurnal Binapraja</i> tahun 2009	Transportasi	Transportasi
	Telekomunikasi	Komunikasi
	Energi	Produksi dan distribusi energi
	Keairan	Air
	Pengelolaan limbah	Sanitasi
		Pengelolaan limbah
	Bangunan	Bangunan gedung
Fasilitas rekreasi		
	Transportasi	Jalan raya

Sumber	Indikator	Variabel
<i>Jan Jacobs, et al, 1999 dalam Sibarani 2002</i>		Kereta api
		Pelabuhan laut
	Kanal	Kanal
		Drainase
	Keairan	Bendungan

Sumber: Sintesa Tinjauan Pustaka 2015

Dari komponen variabel infrastruktur pengembangan wilayah pesisir secara keseluruhan kemudian dipilih indikator dan variabel dalam penelitian yang dirasa sesuai dengan wilayah penelitian berdasarkan penyesuaian kondisi, kebijakan serta telah melakukan wawancara terhadap stakeholder yang ada pada wilayah penelitian. Indikator dan variabel yang dipakai dalam penelitian setelah dilakukan penyesuaian terhadap wilayah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Indikator dan variabel penelitian

Indikator	Variabel
Aksesibilitas dan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Jalan - Moda Transportasi - Fasilitas Pendukung Transportasi
Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Air Bersih - Jaringan listrik - Sistem Drainase - Sistem pengelolaan limbah dan sanitasi - Telekomunikasi - Persampahan
Aspek Pengembangan Infrastruktur Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - <i>Cold Storage</i> - Pabrik Es - SPBU - Koperasi Unit Desa

Sumber: Sintesa Tinjauan Pustaka 2015

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan rasionalistik. Pendekatan ini menggunakan empiri fakta sebagai kebenaran. Dengan kata lain, ilmu yang berasal dari hasil pengamatan indera dengan didukung landasan teori serta diperlukan proses pemikiran. Model analisis yang akan digunakan adalah *theoretical descriptive*, yaitu teori yang digunakan untuk melakukan proses analisis yakni memberikan analisis terhadap program dan objek penelitian, mengenai teori-teori terkait infrastruktur pesisir yang akan digunakan untuk menemukan variabel-variabel penilaian infrastruktur pesisir.

Pada tahapan persiapan penelitian, terlebih dahulu merumuskan teori pembatasan lingkup dan definisi secara teoritik dan kajian empirik yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pengembangan wilayah pesisir, serta berbagai jenis teori tentang infrastruktur. Selanjutnya, teori- teori tersebut dirumuskan menjadi satu kesatuan konseptualisasi teoritik yang mengeluarkan variabel penelitian.

Metode dalam pendekatan yang digunakan adalah metode *empirical analysis* yang memosisikan teori sebagai batasan lingkup dan *theoretical analysis* yang menggunakan teori- teori untuk prospektif dalam penentuan variabel-variabel yang mempengaruhi pengembangan wilayah pesisir. Pada tahapan terakhir merupakan tahapan generalisasi hasil, yang bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan berupa rumusan arahan penanganan yang

didasarkan dari hasil analisis terhadap fakta empiri terkait variabel infrastruktur yang berpengaruh terhadap pengembangan wilayah pesisir serta didukung dengan landasan teori dan kenyataan empiri yang timbul dari hasil analisis untuk mengidentifikasi infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengembangan wilayah pesisir di wilayah studi.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif ini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada masa saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Data tersebut berasal dari naskah kuisisioner, catatan-lapangan, foto serta dokumen resmi lainnya (Moloeng, 1998 Dalam Endang, 2005).

Pada pendekatan kuantitatif, data yang digunakan merupakan hasil observasi (pengamatan) atas sesuatu hal yang dapat dinyatakan dalam angka (numerik) dengan penilaian secara kualitatif mengenai preferensi *stackholders* (Santoso, 2003). Sedangkan pendekatan kualitatif, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa jenis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari situasi yang diamati (Moloeng, 2007:3). Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif terkait dengan tujuan dari penelitian

ini, yaitu merumuskan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir berdasarkan preferensi *stackholders* untuk mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah faktor atau hal yang diteliti yang memiliki ukuran, baik ukuran yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penjelasan defnisi operasional berada pada tabel

“halaman ini sengaja dikosongkan”

Tabel 3.1
Variabel dan Definisi Operasional

Indikator	Variabel	Definisi Operasional
Aksesibilitas dan Transportasi	Jaringan Jalan	Seberapa panjang kondisi kerusakan jalan pada wilayah studi
	Moda Transportasi	Ketersediaan trayek kendaraan umum serta jenis kendaraan pribadi.
	Fasilitas Pendukung Transportasi	Ketersediaan fasilitas pendukung yang tersedia sebagai pelayanan di wilayah studi.
Utilitas	Jaringan Air Bersih	Jangkauan pelayanan pemenuhan air bersih pada wilayah studi.
	Jaringan Listrik	Jangkauan pelayanan pemenuhan listrik pada wilayah studi.

Indikator	Variabel	Definisi Operasional
	Sistem Drainase	Jangkauan pelayanan pemenuhan sistem drainase pada wilayah studi
	Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi	Jangkauan pelayanan pemenuhan sistem pengolahan limbah dan pelayanan pemenuhan sanitasi pada wilayah studi.
	Telekomunikasi	Jangkauan pelayanan pemenuhan telekomunikasi pada wilayah studi.
	Persampahan	Jangkauan pelayanan pemenuhan persampahan pada wilayah studi.
Aspek Pengembangan Infrastruktur Pesisir	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jangkauan pelayanan kebutuhan TPI wilayah pesisir
	<i>Cold Storage</i>	Jangkauan pelayanan kebutuhan <i>cold storage</i> wilayah pesisir

Indikator	Variabel	Definisi Operasional
	Pabrik Es	Jangkauan pelayanan kebutuhan pabrik es wilayah pesisir
	SPBU	Jangkauan pelayanan kebutuhan bahan bakar wilayah pesisir
	Koperasi Unit Desa	Jangkauan pelayanan KUD wilayah pesisir

Sumber: Penulis, 2015

“halaman ini sengaja dikosongkan”

3.4 Populasi dan sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Menurut Kuncoro (2003) populasi adalah kelompok elemen lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana peneliti tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh desa yang termasuk dalam wilayah pesisir di Kecamatan Pasean.

3.4.2 Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target.

3.4.2.1 Purposive Sampling

Teknik penentuan responden yang digunakan dalam menganalisa infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir adalah *purposive sampling* dimana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tapi terfokus pada target. *Purposive Sampling* digunakan untuk menentukan responden dalam kuesioner mendalam untuk eksplorasi secara rinci mengenai infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan, serta dalam kuesioner mengenai aspek-aspek pertimbangan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir di Kecamatan Pasean.

Dalam memudahkan penelitian maka dilakukan pengambilan sampel terhadap populasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan analisis pemetaan stakeholder

(*Stakeholder Mapping*) berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya. Untuk dapat memperoleh informasi yang interpretatif maka diperlukan *stakeholder* utama yang memiliki kapasitas dan kompetensi di dalam lingkup infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Pasean. *Stakeholder* yang dipilih haruslah memiliki kejelasan peran atau kontribusi dalam bidang yang dibutuhkan pada penelitian ini (dalam hal ini adalah infrastruktur yang dibutuhkan di wilayah penelitian), haruslah memiliki kejelasan kapasitas apa yang mereka punya dan *stakeholder* tersebut juga harus memiliki rasa kepedulian terhadap obyek atau bidang penelitian.

Stakeholders adalah pihak-pihak baik perseorangan, kelompok atau suatu institusi yang terkena dampak atas intervensi suatu program, atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi hasil intervensi program tersebut. Menurut Eden dan Ackerman dalam rachmat (2014) menjelaskan bahwa *stakeholder* adalah orang ataupun kelompok yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi secara langsung masa depan suatu organisasi. Dalam penentuan *stakeholder* yang tepat dan benar-benar terkait dalam suatu program sangat kompleks dan memungkinkan adanya *stakeholder* yang tersembunyi atau belum teridentifikasi, maka oleh karena itu diperlukan suatu analisis untuk menentukan *stakeholder*. Analisis *stakeholder* menurut Mayers dalam rachmat (2014) merupakan alat untuk mempelajari konteks sosial dan kelembagaan dengan cara memisahkan peran *stakeholder* ke dalam hak, tanggung jawab, pendapat dan hubungan. Dalam penelitian ini analisis *stakeholder* digunakan untuk penentuan pihak-pihak yang berkompetensi dan terlibat dalam pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Didalam analisis *stakeholder* pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan *stakeholder* kunci yaitu:

1. Mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat, dilakukan melalui studi literatur yang terkait dengan rumusan masalah.
2. Menganalisis kepentingan dan dampak potensial dari permasalahan yang ada terhadap masing-masing *stakeholder*, melalui wawancara terhadap *stakeholder* yang telah diidentifikasi.
3. Menilai tingkat pengaruh (*influence*) dan tingkat kepentingan (*importance*) dari masing-masing *stakeholder*, dilakukan dengan melakukan pembobotan mulai dari tidak berpengaruh sampai sangat berpengaruh/penting dengan skala 1-5.

Berikut ini adalah ilustrasi tabel pengelompokan *stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh.

Tabel 3.2
Pengelompokan *Stakeholder* berdasarkan tingkat kepentingan

Kepentingan/ Pengaruh	Pengaruh Rendah	Pengaruh Tinggi
Kepentingan Rendah	Kelompok <i>stakeholder</i> yang paling rendah prioritasnya	Kelompok <i>stakeholder</i> yang bermanfaat untuk merumuskan atau menjembatani keputusan dan opini
Kepentingan Tinggi	Kelompok <i>stakeholder</i> yang penting namun perlu pemberdayaan	Kelompok <i>stakeholder</i> yang paling kritis

Sumber: UNCHS Habitat, 2001

Sebelum dilakukan analisis pengaruh dan kepentingan *stakeholder*, terlebih dahulu diidentifikasi *stakeholder* dalam

penelitian ini terdiri dari terdiri dari 3 kelompok utama yang terlibat, antara lain:

1. Kelompok (pihak) *Governance*
2. Kelompok (pihak) *Private Sector*
3. Kelompok (pihak) *Civil Society*

Setelah dilakukan analisis stakeholders tersebut, telah dihasilkan stakeholders siapa saja yang layak untuk dijadikan responden dalam penelitian ini sesuai dengan penilaian dan kriteria tertentu. Stakeholders yang sesuai untuk mengeksplorasi infrastruktur yang perlu dikembangkan untuk mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa antara lain adalah sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi;
5. Kantor Kecamatan Pasean
6. Tokoh Masyarakat
7. Akademisi atau PakarAhli Infarstruktur ITS

Table 3.3
Responden Penelitian

Kelompok Stakeholders	Stakeholders	Posisi stakeholders	Alasan Pemilihan
<i>Governance</i>	BAPPEDA Kabupaten Pamekasan	Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana	Memberikan pertimbangan dalam penentuan tingkat kepentingan dan kinerja infrastruktur wilayah pesisir
	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang		Sebagai penyusun peraturan daerah terkait dengan strategi pembangunan kawasan serta berperan dalam penyelenggaraan

Kelompok Stakeholders	Stakeholders	Posisi stakeholders	Alasan Pemilihan
	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Sebagai penyusun peraturan daerah terkait dengan rencana pengembangan wilayah pesisir serta mampu memberikan pertimbangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan wilayah pesisir
<i>Governance</i>	Dinas perhubungan dan komunikasi informasi	Kepala Bidang Perhubungan Laut	Sebagai penyusun peraturan daerah terkait dengan rencana pengembangan

Kelompok Stakeholders	Stakeholders	Posisi stakeholders	Alasan Pemilihan
			an wilayah pesisir serta mampu memberikan pertimbangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan wilayah pesisir
	Kantor Kecamatan Pasean	Camat Kecamatan Pasean	Mampu memberikan masukan terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir karena merupakan pihak yang sangat mengetahui potensi dan masalah,

Kelompok Stakeholders	Stakeholders	Posisi stakeholders	Alasan Pemilihan
			sehingga akan menghasilkan faktor-faktor yang lebih kompleks lagi untuk dapat memecahkan masalah penelitian.
<i>Privat sector</i>	Tokoh Masyarakat	Tokoh Masyarakat	Tokoh masyarakat memberikan masukan pada peneliti terkait dengan infrastruktur wilayah pesisir
<i>Civil Society</i>	Akademisi atau Pakar		Menjadi salah satu motor pertimbangan dalam pengambilan

Kelompok Stakeholders	Stakeholders	Posisi stakeholders	Alasan Pemilihan
			keputusan pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan wilayah pesisir

Sumber: hasil analisis, 2015

3.5 Metode Penelitian

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survei data sekunder dan primer. Pengumpulan data sekunder bersumber dari dokumen yang dimiliki oleh instansi antara lain: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, Badan Pusat Statistik, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lainnya. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode – metode yaitu sebagai berikut.

3.5.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Survei primer adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung (observasi lapangan) serta melalui kuesioner. Survei primer bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi lingkungan dan perubahan-perubahan yang terjadi dengan melihat dan mendengar fakta yang ada tanpa harus mengambil sampel ataupun dengan mengambil sampel. Survei primer dilakukan

sebagai upaya melengkapi data sekunder yang telah ada. Survei data primer terdiri atas :

3.5.1.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian dengan mengamati kondisi buruknya infrastruktur wilayah pesisir. Dalam observasi ini, dilakukan pula dokumentasi untuk mencitrakan kondisi eksisting wilayah penelitian.

3.5.1.2 Kuisisioner

Kuisisioner adalah kumpulan pertanyaan yang telah dibuat sedemikian rupa oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam upaya memberikan jawaban ilmiah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam kuisisioner semua pertanyaan telah dirumuskan sedemikian rupa dan peneliti melaksanakan sesuai dengan rumusan yang telah ada. Banyak sedikitnya pertanyaan yang dirumuskan tergantung pada tujuan penelitian dan hal tersebut akan menentukan macam dan banyak sedikitnya data yang diperlukan.

Tabel 3.4
Data dan Perolehan Data Primer

No	Jenis Data	Sumber data	Teknik pengambilan data
1	Ketersediaan infrastruktur di wilayah pesisir	Pendapat <i>stakeholder</i> dan wilayah penelitian	Kuisisioner dan observasi
2	Kondisi infrastruktur di wilayah pesisir	Pendapat <i>stakeholder</i> dan wilayah penelitian	Kuisisioner dan observasi

3	Karakteristik masyarakat pesisir	Pendapat <i>stakeholder</i> dan wilayah penelitian	Kuisisioner dan observasi
4	Tingkat kepentingan dan tingkat kinerja infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah pesisir	Pendapat <i>stakeholder</i> dan wilayah penelitian	Kuisisioner dan observasi
5	Peraturan tentang perencanaan wilayah pesisir	Pendapat <i>stakeholder</i> dan wilayah penelitian	Kuisisioner dan observasi

Sumber: penulis, 2015

3.5.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder merupakan metode pengumpulan data, informasi dan peta kepada sejumlah instansi dan literatur terkait. Pengumpulan data sekunder terdiri atas:

3.5.2.1 Survei Instansi

Survei instansi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti data sekunder yang merupakan data-data yang bersifat pelengkap. Pada penelitian ini survei instansi dilakukan pada instansi yang memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian seperti Bappeda Kabupaten Pamekasan, Dinas PU Cipta Karya Pamekasan, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi dan sumber-sumber lainnya.

3.5.2.2 Survey Literatur

Studi literatur atau kepustakaan dilakukan dengan meninjau isi dari literatur yang bersangkutan dengan tema penelitian ini,

diantaranya berupa buku, hasil penelitian, dokumen rencana tata ruang, tugas akhir, serta artikel di internet dan media massa. Studi literatur dilakukan dengan membaca, merangkum dan kemudian menyimpulkan semua referensi tentang peningkatan infrastruktur kawasan wisata bahari. Adapun perolehan data sekunder secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5
Data dan Perolehan Data Sekunder

No	Jenis Data	Sumber Data	Instansi Penyedia Data
1	Karakteristik dan kedudukan Kecamatan Pasean dalam Kabupaten Pamekasan	RTRW Kabupaten Pamekasan	Bappeda Kabupaten Pamekasan
2	Gambaran umum wilayah pesisir Kecamatan Pasean	RDTRK Kabupaten Pamekasan	Bappeda Kabupaten Pamekasan
3	Rencana struktur ruang	RZWP Kabupaten Pamekasan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan
4	Kependudukan	Kecamatan Pasean dalam angka	BPS Jawa Timur

No	Jenis Data	Sumber Data	Instansi Penyedia Data
5	Ketersediaan infrastruktur Kecamatan Pasean	Profil kecamatan data monografi desa	BPS Jawa Timur

Sumber: penulis, 2015

3.6 Teknik Analisa Data

3.6.1 Mengidentifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Dalam melakukan analisa identifikasi kondisi eksisting infrastruktur digunakan analisa *Theoritical Deskriptive* karena sangat membantu dalam meringkas perbandingan beberapa variabel data skala dalam satu tabel dan dapat digunakan untuk melakukan pengamatan penyimpangan data. Analisa deskriptif diperlukan dalam menjawab sasaran penelitian yaitu mengidentifikasi kondisi eksisting infrastruktur.

Dalam analisis ini dilakukan pendiskusan antara variabel yang didapat dari kajian pustaka dengan berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan wilayah pesisir sehingga dapat diketahui kondisi eksisting infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Pasean. Variabel yang akan diolah dengan menggunakan analisa deskriptif adalah :

- 1 Ketersediaan infrastruktur di wilayah pesisir
- 2 Kondisi infrastruktur di wilayah pesisir
- 3 Kependudukan
- 4 Karakteristik masyarakat pesisir
- 5 Peraturan tentang perencanaan wilayah pesisir

3.6.2 Menganalisis Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja Infrastruktur Wilayah Pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Penerapan teknik analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur melalui tingkat kepentingan dan kinerja infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Dari hasil kuesioner dapat diketahui kepentingan dan kinerja infrastruktur dari yang paling dominan hingga yang paling kecil berdasarkan preferensi stakeholder

Untuk mengetahui tingkat kepentingan dan tingkat kinerja, menggunakan skala likert melalui dua pertanyaan yaitu seberapa pentingkah dan seberapa baik kinerja dari masing-masing jenis infrastruktur tersebut. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian sosial seperti sikap, pendapat, persepsi sosial seseorang atau kelompok. Skala likert diperlukan untuk mempersiapkan data wawancara yang berisikan tentang infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir, setelah data didapatkan dari hasil wawancara stakeholder kemudian diolah menggunakan alat analisis IPA. Dalam penelitian ini, skala likert digunakan dalam mengukur tingkat kepentingan dan kinerja pengembangan infrastruktur. Skala likert dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Skala Pengukuran Likert

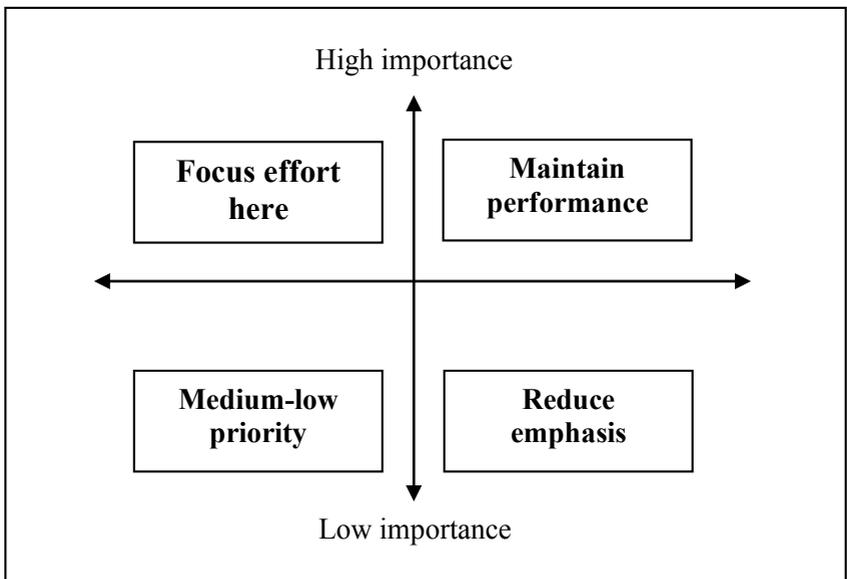
	<i>Importance</i>	<i>performance</i>
5	Sangat Penting	Sangat baik
4	Penting	Baik
3	Cukup Penting	Cukup baik
2	Kurang Penting	Kurang Baik

1	Sangat Kurang Penting	Sangat Kurang Baik
---	-----------------------	--------------------

Sumber: Rangkuti, 2002

Dari penilaian dengan menggunakan skala likert, kemudian dilakukan plotting Mean tersebut ke dalam kuadran IPA seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1



Sumber: Kotler, 1997

Dari diagram di atas dapat diartikan bahwa pada variabel yang termasuk ke dalam kuadran I (focus effort here) dianggap memiliki tingkat kepentingan tinggi dan tingkat kinerja yang rendah sehingga merupakan prioritas untuk dilakukan penanganan serta peningkatan kinerjanya. Pada kuadran II berisi variabel yang dianggap memiliki

tingkat kepentingan tinggi serta kinerja yang tinggi juga, sehingga yang termasuk di kuadran ini perlu dipertahankan. Untuk variabel yang termasuk dalam kuadran III merupakan variabel yang memiliki tingkat kepentingan rendah serta tingkat kinerja yang masih rendah atau kurang optimal, sehingga dibutuhkan pertimbangan kembali untuk dilakukan peningkatan dan penanganan dalam kinerjanya. Sedangkan yang termasuk dalam kuadran IV merupakan variabel yang memiliki kinerja yang sudah optimal akan tetapi tingkat kepentingannya rendah, sehingga tidak perlu untuk dilakukan pengembangan kembali.

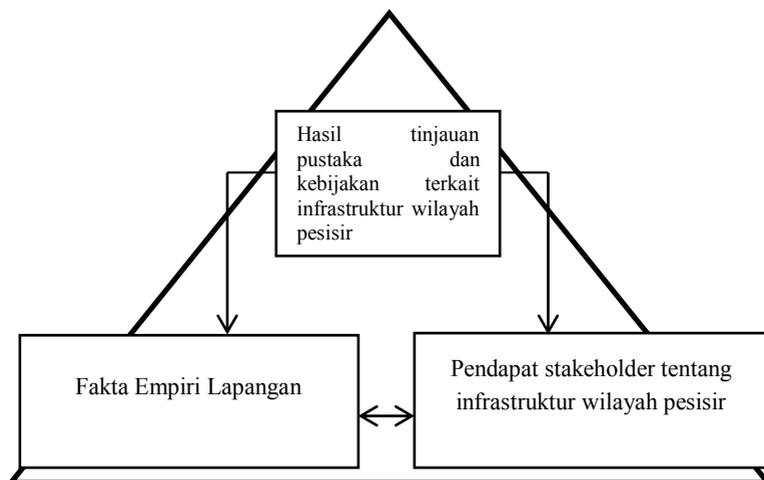
3.6.3 Merumuskan Arahan Pengembangan Infrastruktur Berdasarkan Peran dan Fungsi Wilayah Pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Untuk merumuskan arahan pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan melalui data-data primer dan sekunder yang telah diperoleh serta hasil dan proses *Importance Perfomance Analysis* berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja, kemudian dilakukan dengan menggunakan analisis Triangulasi.

Menurut Sutopo, 2006, triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitannya dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/ sumber (2) triangulasi peneliti (3) triangulasi metodologis (4) triangulasi teoritis. Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomologi yang bersifat multiperspektif, yang artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap diperlukan tidak hanya satu sudut pandang saja. Dalam penelitian ini sumber yang digunakan antara lain:

1. Fakta empiri lapangan
2. Hasil tinjauan pustaka dan kebijakan terkait infrastruktur wilayah pesisir
3. Hasil wawancara/ menurut pakar

Gambar 3.2
Analisa Triangulasi



Sumber: penulis 2015

Pada tahapan analisa ini output yang dihasilkan berupa arahan pengembangan infrastruktur untuk mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa di wilayah penelitian.

3.7 Tahapan Penelitian

Berikut merupakan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini:

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan tahap identifikasi isu permasalahan yang diangkat. Pada penelitian ini mengangkat potensi-potensi sumberdaya alam yang perlu didukung di wilayah pesisir Kecamatan Pasean. Dimana isu permasalahan yang terjadi adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur sehingga sumberdaya pesisir belum dikelola secara optimal. Hal ini yang menjadi alasan

dilakukannya penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kinerja dan kepentingan infrastruktur, serta akan merumuskan arahan pengembangan infrastruktur berdasarkan peran dan fungsi wilayah pesisir di Kecamatan Pasean.

2. Tinjauan Pustaka

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pengumpulan literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas, yaitu teori dan konsep, studi kasus, dan hal-hal lain yang relevan yang berasal dari jurnal, buku, media cetak ataupun yang lain. Hasil studi literatur yang didapat adalah teori-teori tentang infrastruktur khususnya infrastruktur pesisir. Pada akhirnya dari studi literatur didapatkan rumusan variabel-variabel penelitian yang menjadi dasar dalam melakukan analisa.

3. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data-data yang dibutuhkan dalam proses analisa, yaitu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Keakuratan data tentu saja akan mempengaruhi hasil penelitian, untuk itu diperlukan dua teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan secara primer dan sekunder. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan lebih akurat.

4. Analisa

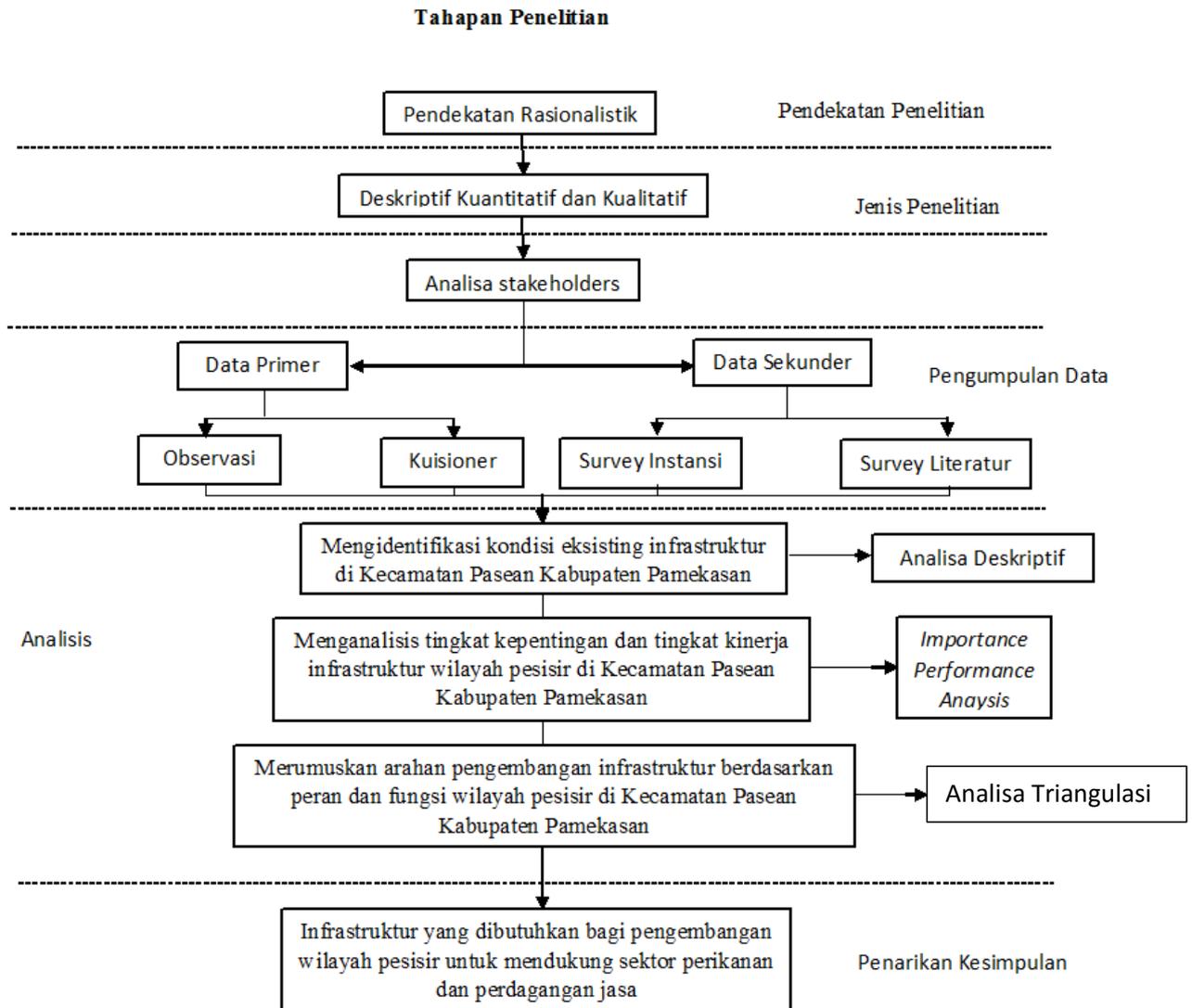
Setelah data/informasi yang dibutuhkan untuk penelitian telah diperoleh, maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah tahap analisis. Dalam proses analisis yang akan dilakukan juga disesuaikan dengan desain penelitian yang telah dibuat sebelumnya, hal ini menghindari adanya kesalahan proses pengerjaan yang mungkin dapat mengganggu hasil penelitian.

5. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses analisis selesai, maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah menarik kesimpulan atas rumusan permasalahan yang telah ditetapkan pada awal penelitian. Kesimpulan tersebut diambil dari hasil proses analisa yang dilakukan. Maka output tersebut akan menjadi input bagi tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya

adalah membuat rekomendasi yaitu berupa rumusan arahan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Pasean.

Gambar 3.3



Tabel 3.7
Teknik Analisis

No	Sasaran	Input Data	Metode Analisis	Output
1	Mengidentifikasi kondisi eksisting infrastruktur di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan infrastruktur di wilayah pesisir • Kondisi infrastruktur di wilayah pesisir • Kependudukan • Karakteristik masyarakat pesisir • Peraturan tentang perencanaan wilayah pesisir 	Analisa Deskriptif	Kesesuaian ketersediaan infrastruktur berdasarkan kondisi eksisting dan literatur

2	Menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja infrastruktur wilayah pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	Tinjauan literatur dan pendapat regulator	<i>Skala likert dan Importance-Performance Analysis</i>	Kuadran infrastruktur berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja
3	Merumuskan arahan pengembangan infrastruktur berdasarkan peran dan fungsi wilayah pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan	Output Sasaran 1 dan output Sasaran 2, tinjauan literatur dan kondisi eksisting	Analisa Triangulasi	Deskripsi arahan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir

Sumber: penulis, 2015

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Wilayah Studi

Secara geografis Kecamatan Pasean terletak pada posisi 113⁰19' - 113⁰58' Bujur Timur dan 6⁰51 - 7⁰31' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, batas administrasi Kecamatan Pasean adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Waru
- Sebelah Barat : Kecamatan Batumarmar dan
Kecamatan Waru
- Sebelah Timur : Kabupaten Sumenep

Luas wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Pasean adalah ±76,88 km² dan secara administratif Kecamatan Pasean terbagi menjadi 9 (sembilan) desa.

Dari 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Pasean, terdapat 4 (empat) desa yang langsung berhadapan dengan pesisir pantai utara yaitu Desa Batukerbuy, Desa Tlontoraja, Desa Bindang, dan Desa Sotabar.

4.1.1 Batas Administratif

A. Desa Batukerbuy

Desa Batukerbuy terletak di Kecamatan Pasean yang memiliki luas wilayah ± 1.465 Ha. Batas administratif dari Desa Batukerbuy adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Desa Tlontoraja
- Sebelah Timur : Desa Bindang
- Sebelah Selatan : Desa Dempo Barat

B. Desa Tlontoraja

Desa Tlontoraja terletak di Kecamatan Pasean yang memiliki luas wilayah \pm 1.389 Ha. Batas administratif dari Desa Tlontoraja adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Desa Sotabar
Sebelah Timur	: Desa Batukerbuy
Sebelah Selatan	: Kecamatan Waru

C. Desa Bindang

Desa Tlontoraja terletak di Kecamatan Pasean yang memiliki luas wilayah \pm 540 Ha. Batas administratif dari Desa Bindang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Desa Batukerbuy
Sebelah Timur	: Kabupaten Sumenep
Sebelah Selatan	: Desa Dempo Timur

D. Desa Sotabar

Desa Sotabar terletak di Kecamatan Pasean yang memiliki luas wilayah \pm 336 Ha. Batas administratif dari Desa Sotabar adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Barat	: Kecamatan Batumarmar
Sebelah Timur	: Desa Tlontoraja
Sebelah Selatan	: Desa Tagangser Daja

4.1.2 Kependudukan dan Karakteristik Sosial

Penduduk wilayah pesisir Kecamatan Pasean berasal dari suku Madura. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura. Berdasarkan survey eksisting, mata pencaharian penduduk wilayah pesisir Kecamatan Pasean didominasi nelayan dan petani. Berikut ini

adalah tabel jumlah penduduk di wilayah pesisir Kecamatan Pasean menurut jenis kelamin :

Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin

Desa/ Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio (%)
	Laki-laki	Perempuan		
Bindang	1.723	1.800	3.523	95,7
Batukerbuy	3.732	4.092	7.824	91,2
Tlontoraja	5.983	6.727	12.710	88,9
Sotabar	2.203	2.163	4.366	101,8
Jumlah	13.641	14.782	284.32	94.4

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa di wilayah perencanaan, penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah 13.641 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 14.782 jiwa.

Sex Ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Sex Ratio di wilayah perencanaan pada tahun 2014 adalah 94.4, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki.

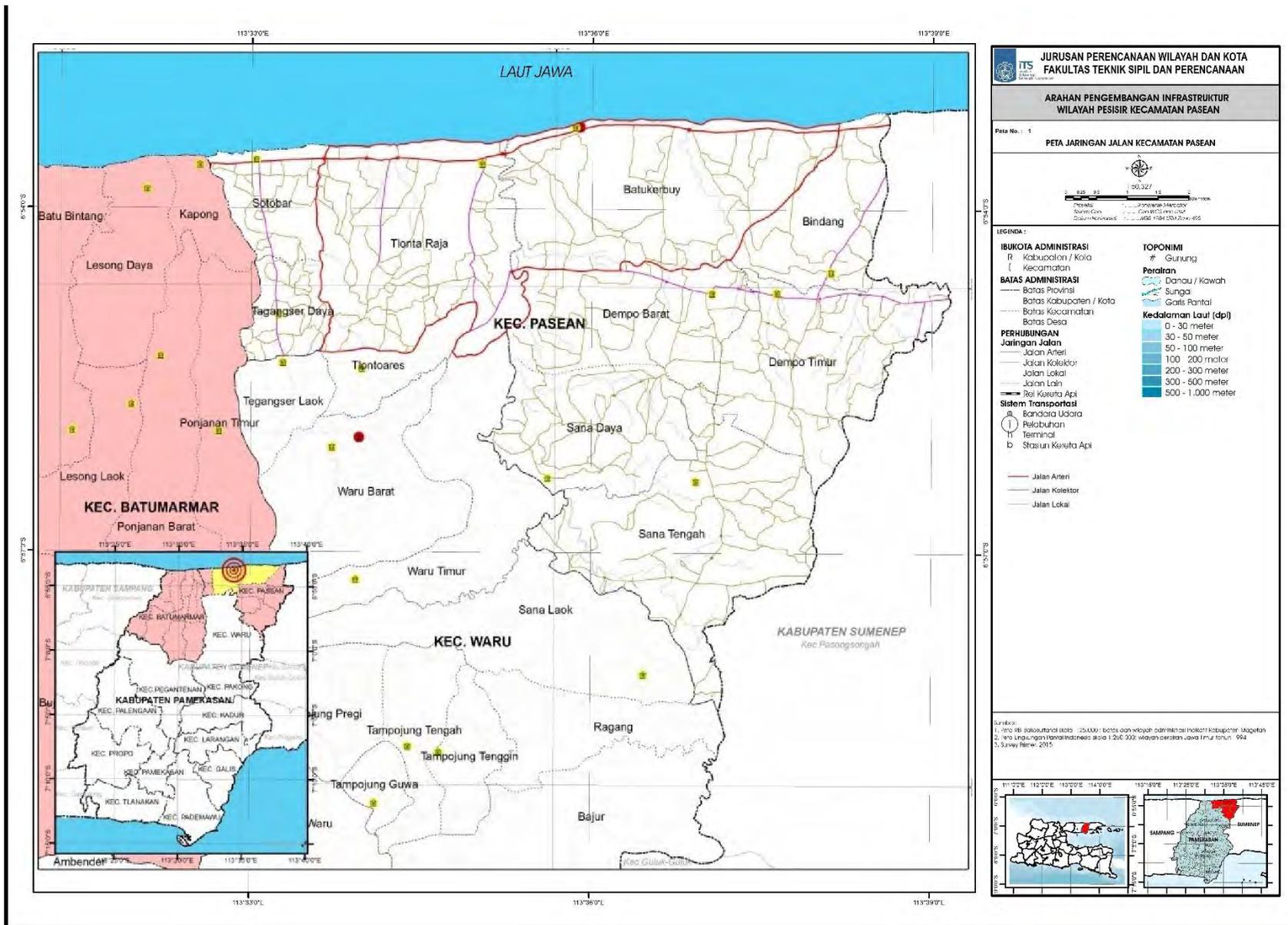
4.2 Identifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

4.2.1 Jaringan Jalan

a. Kondisi Jalan

Berdasarkan data dasar ruas jalan kabupaten/kota di Kabupaten Pamekasan Tahun 2012, Kecamatan Pasean dilalui oleh jalur jalan kabupaten dan yang menghubungkan Kecamatan Pasean dengan Kecamatan Waru. Ruas jalan kabupaten tersebut adalah Waru-

Tlontoraja, Waru Barat-Dempo Timur, Dempo Barat-Sana Laok. Sementara ruas jalan kabupaten yang hanya membentang di Kecamatan Pasean adalah jalan Dempo Barat-Bindang dan Dempo Timur-Prancak. Kemudian ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Pasean dengan Kecamatan Batumarmar adalah jalan Tegengser Daya-Pojanan Barat. Visualisasi jaringan jalan dapat dilihat pada peta jaringan jalan berikut :



Gambar 4. 1 Peta Infrastruktur Jalan

Kecamatan Pasean memiliki dua jenis permukaan jalan, yaitu aspal dan makadam. Pada umumnya kondisi jalan di Kecamatan Pasean ini berada dalam kondisi baik, dimana jalan yang tersedia telah berupa perkerasan aspal, macadam, dan beton cor. Luas total jalan adalah 203,9 km, dengan kondisi jalan baik sepanjang 131,3 km, kondisi rusak ringan 38,5 km, dan kondisi rusak berat 34,1 km. Kondisi jalan tersebut dijelaskan pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Dan Jenis Permukaan Jalan

Jenis Permukaan	Kondisi Jalan (km)			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Panjang (km)
I. Diperkeras				
Aspal	32,6	21,8	18,8	73,2
Makadam	48,9	8,9	9,6	67,4
Beton/Cor/Conblok	21,3	7,8	5,7	34,8
II. Tanah				
	28,5	-	-	28,5
Jumlah	131,3	38,5	34,1	203,9

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

Kondisi jalan yang ada di wilayah pesisir Pasean pada umumnya masih belum mengalami perkerasan jalan. Kondisi ini tersebar pada mayoritas jalan yang menghubungkan TPI ke pasar Pasean. Kondisi jalan yang belum diperkeras cukup memberikan pengaruh negatif terhadap akses sirkulasi TPI dan pemasarannya.



Gambar 4.2 Kondisi Akses Jalan Dari TPI Ke Pasar Pasean Di Desa Tlontoraja



Gambar 4.3 Kondisi Jalan Antar Kecamatan Di Jalan Penghubung Antar Kecamatan

4.2.2 Moda Transportasi

Moda transportasi bermotor yang umum digunakan pada wilayah perencanaan adalah truck, pickup, mini bus, kendaraan roda tiga, dan sepeda motor. Sedangkan moda tidak bermotor yang masih sering digunakan pada pesisir Pasean antara lain becak dan sepeda. Kendaraan bermotor yang paling banyak dipergunakan adalah sepeda motor, sejumlah 3.520 unit. Sedangkan kendaraan tidak bermotor yang paling banyak dipergunakan adalah sepeda, sejumlah 424 unit. Banyaknya kendaraan bermotor dan tidak bermotor menurut desa dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Desa dan Jenisnya

Desa/Kelurahan	Truck dan sejenis	Pick up	Mini bus/colt dan sejenis	Kendaraan roda tiga	Sepeda motor
Bindang	7	14	11	-	524
Batukerbuy	10	21	38	1	1.186
Tlontoraja	17	24	43	5	1.050
Sotabar	5	21	38	4	760
Jumlah	39	80	130	10	3520

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

Tabel 4.4 Banyaknya Kendaraan Tidak Bermotor Menurut Desa dan Jenisnya

Desa/Kelurahan	Becak	Sepeda	Dokar	Cikar
Bindang	-	34	-	-
Batukerbuy	1	54	-	-
Tlontoraja	-	208	-	-
Sotabar	-	128	-	-
Jumlah	1	424	0	0

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

Selain moda transportasi darat yang berada pada wilayah pesisir, pada wilayah perairan laut Kecamatan Pasean juga memiliki moda sarana angkutan laut yang terdiri dari kapal laut, perahu motor, dan perahu tidak bermotor. Sarana angkutan laut yang paling banyak ditemui di wilayah perencanaan adalah kapal laut, sejumlah 4 (empat) unit. Banyaknya sarana angkutan laut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Banyaknya Sarana Angkutan Laut Menurut Desa dan Jenisnya

Desa/Kelurahan	Kapal Laut	Perahu Motor	Perahu Tidak Bermotor
Bindang	-	-	-
Batukerbuy	-	-	-
Tlontoraja	3	-	-
Sotabar	1	-	-
Jumlah	4	0	0

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

4.2.3 Fasilitas Pendukung Transportasi

Sarana pendukung transportasi di wilayah perencanaan terdiri dari terminal, pangkalan ojek, areal parkir, serta pelabuhan. Jumlah pangkalan ojek berjumlah 3 (tiga) unit, sedangkan fasilitas pelabuhan dan terminal masing-masing 1 (satu) unit.

Tabel 4.6 Banyaknya Sarana Pendukung Angkutan Menurut Desa dan Jenisnya

Desa/Kelurahan	Terminal	Pangkalan Ojek	Areal Parkir	Pelabuhan
Bindang	-	-	-	-
Batukerbuy	-	-	-	1
Tlontoraja	1	3	-	1
Sotabar	-	-	-	-
Jumlah	1	3	0	2

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

4.2.4 Terminal

Fasilitas terminal di wilayah perencanaan terletak di Desa Tlontoraja. Kondisi eksisting fasilitas terminal dalam keadaan non aktif, dikarenakan masyarakat lebih memilih memanfaatkan Pasar Pasean sebagai titik keberangkatan-kedatangan memanfaatkan moda transportasi umum.

4.2.5 Jaringan Air Bersih

Sumber air yang digunakan oleh masyarakat pesisir Pasean pada umumnya berasal dari air kemasan, PDAM, sumur, bor, pompa dan mata air. Masyarakat pesisir Pasean lebih memilih sumur/bor/pompa sebagai sumber air minum utama, hal ini terlihat dari total pengguna sumur/bor/pompa sebanyak 4.519 rumah tangga. Sedangkan sumber air minum air kemasan adalah yang paling sedikit digunakan masyarakat pesisir Pasean, yaitu sebanyak 76 rumah tangga. Jumlah pengguna berdasarkan masing-masing sumber air yang dipakai beserta sarana air dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.7 Banyaknya Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama

Desa/ Kelurahan	Air kemas an	PDAM	Sumur/Bor/ Pompa	Mata Air	Jumlah
Bindang	-	-	1.043	-	1043
Batukerbuy	14	1.211	1.116	-	2.341
Tlontoraja	28	1.198	1.770	516	3.512
Sotabar	34	-	590	624	1.248
Jumlah	76	2.409	4.519	1.140	8.144

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

Berdasarkan jenis sarana air bersih, sumur biasa/pergi adalah sarana terbanyak yang ditemui di wilayah perencanaan pesisir Pasean

dengan jumlah total 1.649 unit. Jumlah sarana air bersih menurut desa dan jenis prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Banyaknya Sarana Air Bersih Menurut Desa dan Jenis Sarana

Desa/Kelurahan	Sumur Bor	Sumur Pompa	Sumur/Pergi	Mata Air	Jumlah
Bindang	1	-	241	-	242
Batukerbuy	1	-	586	-	587
Tlontoraja	-	-	614	7	621
Sotabar	-	-	208	1	209
Jumlah	2	0	1649	8	1.659

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

4.2.6 Jaringan Listrik

Ketersediaan jaringan listrik di wilayah pesisir Pasean cukup memadai, dengan jumlah total pengguna PLN sebanyak 7.805 rumah tangga. Dari jumlah total pengguna PLN tersebut, 7.306 rumah tangga diantaranya menggunakan meteran, dan 499 rumah tangga diantaranya tanpa menggunakan meteran. Banyaknya rumah tangga pengguna PLN dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9 Banyaknya Rumah Tangga Menggunakan PLN

Desa/Kelurahan	PLN		Jumlah
	Meteran	Tanpa Meteran	
Bindang	684	294	978
Batukerbuy	2.076	164	2.240
Tlontoraja	3.372	162	3.534
Sotabar	1.174	29	1.203
Jumlah	7.306	499	7.805

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

4.2.7 Drainase

Fasilitas drainase di wilayah pesisir Pasean belum tersedia.

4.2.8 Limbah dan Sanitasi

Fasilitas pengolahan limbah di wilayah pesisir Pasean merupakan sistem limbah yang sebagian besar sudah menggunakan septik tank dan sanitasi limbah dan sanitasi yang terdapat di wilayah pesisir Pasean pada masing-masing rumah tangga sebagian besar sudah memiliki tempat buang air besar, akan tetapi masih tidak sedikit juga yang belum memiliki fasilitas sendiri sehingga menggunakan fasilitas sanitasi bersama.

4.2.9 Telekomunikasi

Wilayah pesisir Pasean untuk sarana telekomunikasi yang digunakan berasal dari sambungan telepon dan sebagian besar masyarakatnya sudah menggunakan telepon genggam dan hanya sedikit yang menggunakan telepon kabel, tetapi masih ada juga penduduk yang tidak menggunakan alat telekomunikasi apapun.

Di wilayah pesisir Pasean juga masih ada kantor pos serta agen pengiriman barang. Persebaran sarana komunikasi paling banyak ditemui di Desa Tlontoraja, sedangkan Desa Bindang dan Batukerbuy tidak memiliki sarana telekomunikasi. Berikut data sarana telekomunikasi yang ada di wilayah pesisir Pasean.

Tabel 4.10 Banyaknya Sarana Komunikasi Menurut Desa dan Jenisnya

Desa/Kelurahan	Kantor Telkom	Kantor Pos	Agen/Jasa Pengiriman	Warnet
Bindang	-	-	-	-
Batukerbuy	-	-	-	-
Tlontoraja	-	1	1	2
Sotabar	-	-	-	2
Jumlah	0	1	1	4

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015



Gambar 4.4 Peta Cakupan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
(Sumber : RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2032)



Gambar 4.5 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik (SANIMAS)
(Sumber : RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2032)

4.2.10 Persampahan

Secara umum pola pengumpulan di wilayah pesisir Pasean pada umumnya menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung (*door to door*) yaitu sampah diambil dari masing-masing tempat menggunakan bak motor dibawa menuju TPS di Desa Batukerbuy.

4.2.11 Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kecamatan Pasean merupakan wilayah pesisir yang terletak di pesisir utara Kabupaten Pamekasan. Komoditas unggulan dari sektor perikanan adalah berupa ikan segar (bandeng, dll). Kecamatan Pasean terkenal sebagai daerah pemasok ikan untuk Kabupaten Pamekasan. Kegiatan perikanan di kecamatan ini dilengkapi dengan ketersediaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tlontoraja.



Gambar 4.6 Tempat Pelelangan Ikan di Desa Tlontoraja

Kondisi tempat pelelangan ikan (TPI) di Desa Tlontoraja sudah rusak dan tidak dipakai lagi oleh masyarakat sebagaimana fungsinya. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas ini. Kurangnya pemanfaatan TPI lebih diakibatkan karena fasilitas ini yang masih minim dalam hal dukungan infrastruktur dan pengelolaan.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara lapangan, fasilitas TPI sangat jarang digunakan, bahkan pada musim-musim panen ikan.



Gambar 4.7 Kondisi Fasilitas TPI di Desa Tlontoraja

4.2.12 Cold Storage

Cold storage di wilayah pesisir masih belum tersedia. Menurut hasil observasi lapangan, masyarakat pesisir membutuhkan cold storage untuk menjaga kesegaran ikan dan hasil produksi dari home industri untuk dikirim ke luar Kecamatan Pasean.

4.2.13 Pabrik Es

Pabrik es di wilayah pesisir Kecamatan Pasean masih belum tersedia. Menurut hasil observasi lapangan, masyarakat pesisir masih banyak yang menggunakan es yang dibuat oleh rumah tangga untuk pergi melaut.

4.2.14 SPBU

Wilayah pesisir Kecamatan Pasean memiliki SPBU yang dikelola secara pribadi dan diperuntukkan pada nelayan yang akan melaut, namun SPBU ini tidak berfungsi. Banyak nelayan yang mengeluh akibat SPBU ini tidak berfungsi. Menurut masyarakat, dengan berfungsinya SPBU memudahkan nelayan dalam mengisi

bahan bakar kapal atau perahu tempel. SPBU ini berada di Desa Tlontoraja.



Gambar 4.8 Kondisi Fasilitas SPBU di Desa Tlontoraja

4.2.15 Koperasi Unit Desa

Kecamatan Pasean memiliki koperasi unit desa (KUD) khusus warga pesisir yang melaut di wilayah Pasean. Akan tetapi KUD ini kondisinya sudah rusak dan tidak dipakai lagi. Berikut foto kondisi KUD yang berada di Desa Tlontoraja.



Gambar 4.9 Kondisi Fasilitas KUD di Desa Tlontoraja

Berdasarkan data statistik, persebaran lembaga keuangan di wilayah pesisir Pasean tidak merata, karena hanya tercatat di Desa

Tlontoraja dan Desa Sotabar. Sedangkan Desa Bindang dan Batukerbuy tidak memiliki fasilitas lembaga keuangan. Jumlah lembaga keuangan di Desa Tlontoraja sebanyak 1 (satu) unit Bank, 2 (dua) unit koperasi, dan 1 (satu) unit pegadaian. Sedangkan hanya tercatat 1 (satu) unit koperasi di Desa Sotabar.

Tabel 4.11 Banyaknya Lembaga Keuangan Menurut Desa Jenisnya

Desa/Kelurahan	Bank	Koperasi	Pegadaian
Bindang	-	-	-
Batukerbuy	-	-	-
Tlontoraja	1	2	1
Sotabar	-	1	-
Jumlah	1	3	1

Sumber: Kecamatan Pasean Dalam Angka, 2015

4.3 Identifikasi Kondisi Sosial Budaya Pesisir Pasean

4.3.1 Perekonomian Pesisir Pasean

A. Home industri

Wilayah pesisir Kecamatan Pasean memiliki potensi Industri petis dan pindang yang berada di Desa Tlontoraja dan Desa Batukerbuy. Kecamatan Pasean merupakan penghasil petis dengan kualitas terbaik se-Kabupaten Pamekasan. Namun demikian potensi pengolahan hasil laut ini kurang dilengkapi dengan *packaging* yang baik, sehingga mengurangi kualitas penampilan produk yang berimbas pada persaingan produk dalam penjualan pasar. Menurut hasil wawancara, home industri pada saat ini masih mempunyai skala prioritas yang kecil akan tetapi direncanakan untuk mendukung sektor perdagangan jasa dengan hasil sumberdaya pesisir setelah beroperasinya pelabuhan yang ada di Kecamatan Pasean.



Gambar 4.10 Pengelolaan Perikanan di Desa Tlontoraja



Gambar 4.11 Pengolahan Hasil Tangkap di Desa Tlontoraja



Gambar 4.12 Industri Rumahan Pengolahan Ikan di Desa Tlontoraja



Gambar 4.13 Pengolahan Ikan di Desa Bindang, Desa Sotabar dan Desa Tlontoraja

B. Pasar

Wilayah pesisir di Kecamatan Pasean ini juga terdapat pasar di Desa Tlontoraja. Keberadaan pasar ini kurang ditunjang dengan akses jalan yang baik, khususnya akses jalan yang menghubungkan pasar dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra *home industry* pindang dan petis. Desa yang memiliki Home Industry hasil pengolahan pesisir adalah Desa Sotabar, Desa Bindang dan Desa Tlontoraja



Gambar 4.14 Pasar Desa Tlontoraja



Gambar 4.15 Aktivitas Pasar Desa Tlontoraja

Di pasar Tlontoraja menyediakan untuk kebutuhan sehari-hari, hasil pertanian serta terdapat hasil pengelolaan perikanan seperti petis, pindang asap dan terasi. Dikarenakan sebagian besar wilayah pesisir Pasean nelayan dan petani. Meskipun pasar di Desa Tlontoraja skalanya masih kecil, pasar ini merupakan sarana yang ada untuk mendukung sektor perikanan yang akan berkembang sesuai rencana kebijakan daerah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah.



Gambar 4.16 Aktivitas Nelayan Pesisir Pasean Desa Tlontoraja

Berdasarkan data statistik, rumah tangga perikanan laut yang terbanyak adalah di Desa Tlontoraja sebanyak 129 rumah tangga dan menggunakan motor tempel. Mayoritas masyarakat wilayah pesisir Pasean masih menggunakan cara tradisional/tanpa perahu untuk mencari hasil laut. Sedangkan jumlah perahu/kapal penangkap ikan terbanyak ditemui di Desa Tlontoraja sejumlah 142 unit. Rumah tangga perikanan laut menurut desa dan jenis sarana yang digunakan serta jumlah perahu/kapal penangkap ikan dapat dilihat lebih detail dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.12 Rumah Tangga Perikanan Laut Menurut Desa dan Jenis Sarana

Desa/Kelurahan	Kapal Motor	Motor Tempel	Perahu	Tanpa Perahu
Bindang	-	3	-	21
Batukerbuy	-	48	-	84
Tlontoraja	-	129	3	129
Sotabar	-	38	-	58
Jumlah	0	218	3	292

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan, 2013

Tabel 4.13 Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan menurut Desa

Desa/Kelurahan	Kapal Motor	Motor Tempel	Perahu
Bindang	-	2	-
Batukerbuy	-	68	-
Tlontoraja	-	142	-
Sotabar	-	69	-
Jumlah	0	281	0

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan, 2013

C. Pelabuhan Pasean

Pelabuhan terletak di Desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean. Pelabuhan ini berjarak kira-kira 50km arah utara dari Kota Pamekasan. Menurut Rencana Tata Ruang Kabupaten Pamekasan, pelabuhan Pasean berfungsi sebagai penyeberangan lintas provinsi serta sebagai pelabuhan pengumpul. Sesuai fungsinya, pada pelabuhan ini akan ada kegiatan bongkar muat barang dan arus keluar masuk orang. Pelabuhan ini akan melayani penyeberangan Madura ke/dari Kalimantan dan Sulawesi.

Pelabuhan Pasean memiliki akses melalui jalur utara maupun jalur selatan. Akses jalur utara dapat dicapai dengan menggunakan jalan Pantai Utara Pulau Madura yang akan dikembangkan sebagai jalan strategis nasional. Akses melalui jalur selatan dapat dicapai dari Kecamatan Pamekasan melalui Kecamatan Waru. Jalan Pantai Utara Pulau Madura cukup sempit dan kondisinya kurang baik. Akses melalui Kecamatan Pamekasan juga melewati jalan yang sempit dan berliku melewati pegunungan. Pintu masuk Pelabuhan Pasean dekat dengan pertemuan tiga ruas jalan sehingga dikhawatirkan berpotensi menyebabkan kecelakaan maupun kemacetan.

Akan tetapi Pelabuhan Pasean masih ini belum berfungsi secara operasional. Berikut foto sarana Pelabuhan Pasean:



Gambar 4.17 Kondisi Pelabuhan Pasean di Desa Batukerbuy



**Gambar 4.18 Fasilitas Breakwater Pelabuhan Pasean
di Desa Batukerbuy**

4.4 Analisa dan Pembahasan

4.4.1 Mengidentifikasi Kondisi Eksisting Infrastruktur di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Dalam mengidentifikasi kondisi eksisting infrastruktur dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dimana variabel yang didapatkan dari hasil kajian pustaka akan dibenturkan dengan kebijakan dan peraturan perundangan yang berkaitan. Variabel yang memiliki kemiripan akan dikelompokkan dan akan membentuk beberapa infrastruktur.

Tabel 4.14
Identifikasi Kondisi Eksisting di Pesisir Pasean

No	Variabel	Kondisi	Hasil Analisis
1	Jaringan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan kolektor primer sudah baik - Jaringan jalan kolektor sekunder banyak yang berlubang (Penghubung antar Kecamatan) - Jaringan jalan lingkungan dengan jenis permukaan makadam - Akses dari lokasi TPI ke pasar masih belum diaspal (makadam) terletak di Desa Tlontoraja. 	Dibutuhkan pengembangan jaringan jalan yang menjangkau seluruh desa sebagai penunjang membuka akses, meningkatkan perkembangan ekonomi serta mempercepat daya jangkau menuju pusat kota atau wilayah lain dan sekitarnya.
2	Moda Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan moda transportasi darat yang paling dominan adalah sepeda motor yang digunakan lebih sering untuk mobilitas internal wilayah. - Moda transportasi berupa pickup dan truck digunakan masyarakat sebagai moda sarana pengangkut hasil sumberdaya pesisir antar wilayah. 	Moda transportasi merupakan sarana penting dalam kegiatan social dan ekonomi masyarakat pesisir Pasean dalam berpindah tempat. Kegiatan pemanfaatan moda transportasi masyarakat pesisir terbagi kedalam dua jenis : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan moda transportasi antar wilayah

No	Variabel	Kondisi	Hasil Analisis
			b. Pemanfaatan moda transportasi intern wilayah
3	Fasilitas Pendukung Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat pesisir yang terlayani oleh fasilitas transportasi masih belum merata - Fasilitas pendukung seperti terminal sudah tidak berfungsi (Desa Tlontoraja). 	- Pesisir Pasean masih belum didukung oleh pelayanan fasilitas pendukung transportasi yang memadai.
4	Jaringan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar wilayah penelitian sudah terjangkau oleh jaringan pelayanan air bersih - Pemanfaatan air bersih lebih digunakan pada permukiman. - Pemanfaatan air bersih pada kegiatan sumberdaya pesisir seperti pengolahan ikan dan TPI sudah terpenuhi. 	- Kebutuhan jaringan air bersih menjadi salah satu infrastruktur yang penting dalam pemanfaatannya pada pesisir Pasean. Terlihat pada pemanfaatannya yang bersinggungan langsung dengan kegiatan ekonomi dan social masyarakat.
5	Jaringan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan energi listrik pada pesisir Pasean lebih dimanfaatkan pada kegiatan social masyarakat sebagai penerangan utama permukiman. - Pemanfaatan pada kegiatan perikanan dan sumberdaya lain masih sebatas pada supply pokok yang sudah terpenuhi. 	- Kebutuhan energi listrik pada pesisir Pasean sudah terpenuhi secara merata. Pengembangan yang dapat dilakukan dapat mengikuti perkembangan jenis kegiatan yang dibutuhkan
6	Drainase	- Fasilitas drainase di wilayah pesisir Pasean belum tersedia.	- Drainase dibutuhkan pengembangan untuk mencegah terjadinya luapan air yang mengakibatkan banjir
7	Sistem Pengelolaan	- Belum terdapat pengolahan limbah dan	Pengelolaan limbah dan sanitasi dibutuhkan pengembangan untuk

No	Variabel	Kondisi	Hasil Analisis
	Limbah dan Sanitasi	<p>sanitasi yang terpadu di masyarakat pesisir Pasean.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada pengelolaan perikanan di TPI Pasean juga belum terdapat pengelolaan limbah yang terpadu. Pengolahan limbah yang ada masih bersifat konvensional, dikumpulkan pada satu titik. 	<p>mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air kotor limbah permukiman maupun limbah dari hasil pengelolaan sumberdaya pesisir.</p>
8	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan sarana telekomunikasi sudah didominasi oleh sarana jaringan nirkabel dari BTS seluler 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan jaringan telekomunikasi sudah optimal. Pelayanan jaringan yang ada sudah menjangkau pesisir Pasean secara merata.
9	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Timbulan sampah pesisir Pasean didominasi oleh sampah hasil dari permukiman, pasar dan TPI. - Pengelolaan persampahan pada pesisir Pasean masih tergolong konvensional dengan cara ditimbun, dibakar, atau dikumpulkan pada beberapa titik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana pengelolaan persampahan masih belum tersedia. - Sarana pengelolaan persampahan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
10	TPI	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah tersedia, akan tetapi rusak berat dan tidak berfungsi. - TPI pesisir Pasean tidak digunakan secara maksimal oleh masyarakat nelayan dan terkesan terbengkalai 	<p>Sektor perikanan merupakan komoditas utama di wilayah pesisir pasean, jika fasilitas yang tersedia tidak dipergunakan dengan maksimal dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perikanan. Oleh karena itu, optimalisasi</p>

No	Variabel	Kondisi	Hasil Analisis
			<p>pemanfaatan TPI ini menjadi prioritas utama dalam pengembangan kawasan pesisir pasean, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi pemanfaatan TPI ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktifitas nelayan pesisir pasean diarahkan terpusat di sekitar TPI b. Kualitas fasilitas TPI ditingkatkan dan dipelihara dengan baik dan dievaluasi secara berkala c. Peningkatan minat konsumen terhadap keberadaan TPI <p>Pemerintah selaku pemangku kebijakan dapat memperhatikan dengan serius terhadap pengembangan TPI pasean baik dari segi fisik maupun non-fisik</p>
11	<i>Cold Storage</i>	- Belum tersedia	<i>Cold Storage</i> dibutuhkan sebelum barang komoditas yang didinginkan didistribusikan ke tempat tujuan dengan kendaraan yang sudah disediakan sistem pendingin tertentu.
12	Pabrik Es	- Belum tersedia	Pabrik es dibutuhkan nelayan dalam jumlah yang

No	Variabel	Kondisi	Hasil Analisis
			cukup besar untuk menjaga kesehatan hasil laut sebelum dipasarkan
13	SPBU	- Sudah tersedia satu fasilitas pengisian bahan bakar, akan tetapi tidak dioperasikan.	SPBU dibutuhkan untuk mempermudah para nelayan yang menggunakan bahan bakar
14	Koperasi Unit Desa	- Sudah tersedia akan tetapi rusak berat dan tidak berfungsi	KUD di wilayah pesisir Pasean dibutuhkan untuk mengorganisir kegiatan masyarakat dan nelayan dan usaha

Sumber: Hasil Analisis, 2015

4.5 Analisa dan Pembahasan

4.5.1 Menganalisis Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja Infrastruktur Wilayah Pesisir di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Untuk mengetahui infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan diperlukan analisis yang membandingkan antara kinerja dan kepentingan dari setiap variabel infrastruktur wilayah pesisir. Analisa yang digunakan adalah *Importance-Performance Analysis*, yaitu analisis yang menghitung selisih antara kinerja dan kepentingan dari setiap variabel infrastruktur wilayah pesisir oleh setiap responden. Responden yang digunakan untuk analisis ini adalah stakeholder terkait pengembangan infrastruktur wilayah pesisir. Setelah mendapat data dari para responden yang merupakan stakeholder wilayah pesisir, maka selanjutnya dicari nilai rata-rata dari hasil kuesioner.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah setelah melakukan penghitungan pada hasil kuesioner yang telah didapat dari para responden, perlu diketahui jumlah rata-rata dari tingkat kepentingan dan rata-rata dari tingkat kinerja dengan mencari nilai rata-rata pada jumlah nilai dari masing-masing variabel. Kemudian

ditentukan mean dari masing-masing jumlah nilai yang terdapat pada tingkat kepentingan dan tingkat kinerja yang disebut dengan C-Line. C-Line tersebutlah yang kemudian digunakan untuk menentukan garis tengah perpotongan antar kuadran.

Untuk menentukan infrastruktur apa saja yang dikembangkan di wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan dilakukan analisis IPA dengan sampel berupa stakeholder yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan wilayah pesisir. Sehingga dihasilkan urutan infrastruktur yang dibutuhkan menurut tingkat kepentingan dan tingkat kinerja pada wilayah pesisir.

Berikut merupakan hasil dari analisis IPA yang dilakukan pada wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Hasil-hasil tersebut kemudian didapat bahwa variabel infrastruktur yang termasuk ke dalam kuadran I merupakan infrastruktur yang paling dibutuhkan dalam pengembangan infrastruktur wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Hal tersebut berdasar pada tingginya tingkat kepentingan serta rendahnya kinerja yang dimiliki oleh infrastruktur yang terdapat di wilayah pesisir. Hasil analisis Importance-Performance terdapat pada penjelasan berikut.

4.5.2 Analisis Infrastruktur Berdasarkan Tingkat Kepentingan Dan Kinerja

Untuk mengetahui infrastruktur apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan, dilakukan analisis terhadap stakeholder untuk menentukan infrastruktur yang dibutuhkan bagi pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan.

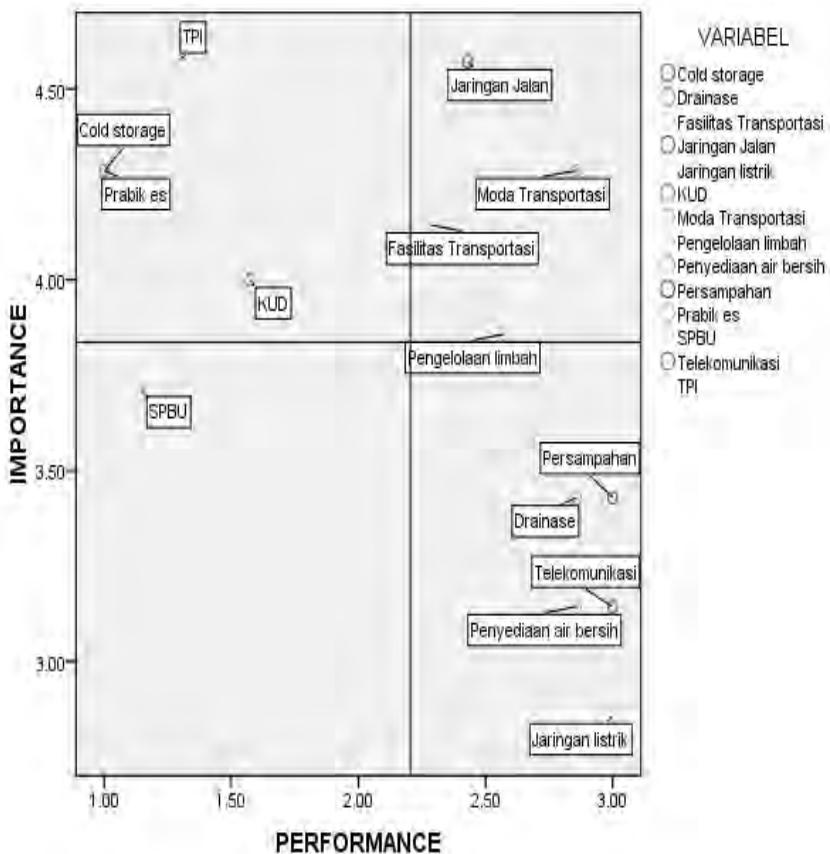
Tabel 4.15
Nilai Tingkat Kepentingan Dan Kinerja Infrastruktur
Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

No.	Variabel	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kinerja
1	Jaringan Jalan	4.57	2.42
2	Moda Transportasi	4.28	2.85
3	Fasilitas Transportasi	4.14	2.28
4	Jaringan Air Bersih	3.14	2.85
5	Jaringan Listrik	2.85	3
6	Drainase	3.42	2.85
7	Pengelolaan Limbah dan Sanitasi	3.85	2.57
8	Telekomunikasi	3.14	3
9	Persampahan	3.42	3
10	TPI	4.57	1.28
11	<i>Cold Storage</i>	4.28	1
12	Pabrik es	4.28	1
13	SPBU	3.71	1.14
14	KUD	4	1.57
Jumlah		53.71	30.85
C-Line		2,20	3,84

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Tempat pelelangan ikan (TPI), *cold storage*, pabrik es dan Koperasi Unit Desa memiliki nilai tingkat kepentingan diatas 3,84 dan nilai kinerja dibawah 2,20. Hal tersebut berarti bahwa infrastruktur-infrastruktur tersebut berada di kuadran I dan merupakan infrastruktur yang memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi kinerjanya rendah. Infrastruktur jaringan jalan, moda transportasi, fasilitas pendukung transportasi dan pengelolaan limbah dan sanitasi termasuk dalam kuadran II karena memiliki nilai tingkat kepentingan diatas 3,84 dan nilai kinerja diatas 2,20, yang berarti bahwa tingkat kepentingan yang dimiliki oleh infrastruktur tersebut tinggi dan kinerja yang dimiliki juga baik.

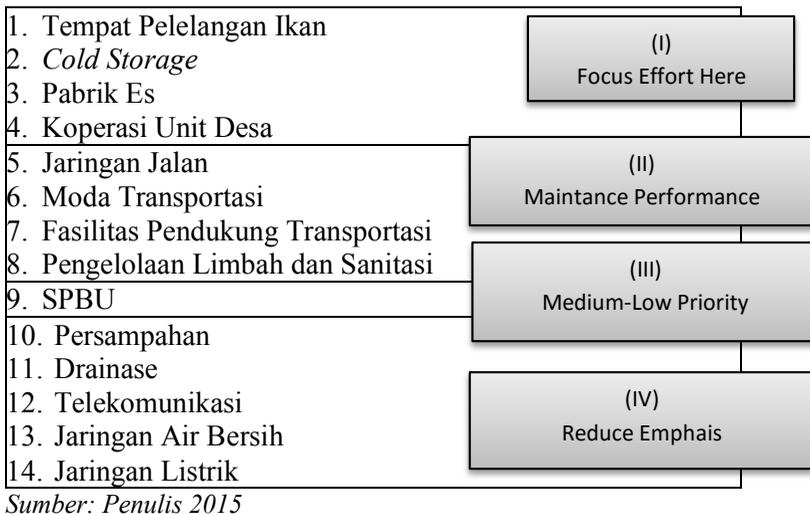
Di kuadran III terdapat infrastruktur SPBU yang memiliki tingkat kepentingan dengan nilai dibawah 3,84 dan nilai kinerja di bawah 2,20. Nilai tersebut berarti kinerja yang dimiliki oleh SPBU adalah buruk dan memiliki tingkat kepentingan yang rendah pula. Sedangkan infrastruktur jaringan listrik, jaringan air bersih, telekomunikasi, drainase, dan persampahan berada pada kuadran IV, dengan nilai tingkat kepentingan dibawah 3,84 dan nilai kinerja diatas 2,20. Hal tersebut berarti bahwa tingkat kepentingan yang dimiliki oleh infrastruktur-infrastruktur tersebut rendah tetapi kinerja yang dimiliki baik. Matriks pembagian kuadran infrastruktur dapat dilihat pada **Gambar 4.19**



Gambar 4.19

Matriks *Importance-Performance Analysis* Pesisir Pasean

Urutan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat kinerja sesuai dengan matriks tersebut adalah pada **Gambar 4.20** dibawah ini:



Gambar 4.20

Urutan Infrastruktur Berdasarkan Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kinerja

Dari urutan diatas dapat disimpulkan bahwa prioritas pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja adalah:

1. Kuadran I (*focus effort here*), infrastruktur yang termasuk di dalamnya yaitu:
 - a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - b. Cold Storage
 - c. Pabrik Es
 - d. Koperasi Unit Desa

2. Kuadran II (*maintain performance*), dengan jenis infrastruktur antara lain:
 - a. Jaringan Jalan
 - b. Moda Transportasi
 - c. Fasilitas Pendukung Transportasi
 - d. Pengelolaan Limbah dan Sanitasi
3. Kuadran III (*medium-low priority*), dengan infrastruktur berupa fasilitas SPBU
4. Kuadran IV (*reduce emphasis*), berupa infrastruktur sebagai berikut:
 - a. Persampahan
 - b. Drainase
 - c. Telekomunikasi
 - d. Jaringan Air Bersih
 - e. Jaringan Listrik

4.5.3 Merumuskan Arahannya Pengembangan Infrastruktur Berdasarkan Peran dan Fungsi Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan

Dalam merumuskan arahan pengembangan infrastruktur berdasarkan peran dan fungsi wilayah pesisir dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dimana variabel yang didapatkan dari hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan kondisi eksisting infrastruktur, hasil dari sasaran 2 yaitu tingkat kepentingan dan kinerja infrastruktur wilayah pesisir, kebijakan serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur pesisir.

KUADRAN	VARIABEL	FAKTA EMPIRIK	MENURUT PAKAR	TINJAUAN PUSTAKA/KEBIJAKAN	ANALISA	ARAHAN
Kuadran I <i>(focus effort here)</i>	Tempat Pelelangan Ikan	Sudah terdapat fasilitas TPI pada pesisir pasean yang terletak pada Desa Tlontoraja namun dalam kondisi yang tidak layak untuk digunakan	Tempat Pelelangan Ikan merupakan infrastruktur yang berperan penting terhadap aktifitas nelayan dan masyarakat pesisir Pasean.	Dari karakteristiknya, infrastruktur yang paling berperan adalah infrastruktur yang berkaitan dengan karakteristik aktivitas ekonomi wilayah pesisir tersebut seperti pelelangan ikan (Satria, 2004).	Sektor perikanan merupakan komoditas utama di wilayah pesisir pasean, jika fasilitas yang tersedia tidak dipergunakan dengan maksimal dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perikanan. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan TPI ini menjadi prioritas utama dalam pengembangan kawasan pesisir pasean, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam optimalisasi pemanfaatan TPI ini adalah : - Aktifitas nelayan pesisir pasean diarahkan terpusat di sekitar TPI - Kualitas fasilitas TPI ditingkatkan dan dipelihara	Peningkatan Kinerja Infrastruktur TPI, dan KUD Serta Penyediaan Infrastruktur Cold Storage dan Pabrik Es Sebagai Upaya Mendukung Pengembangan Sektor Perikanan dan Perdagangan Jasa wilayah Pesisir Pasean

					dengan baik dan dievaluasi secara berkala - Peningkatan minat konsumen terhadap keberadaan TPI Pemerintah selaku pemangku kebijakan dapat memperhatikan dengan serius terhadap pengembangan TPI pasean baik dari segi fisik maupun non-fisik	
	<i>Cold Storage</i>	<i>Cold Storage</i> di wilayah pesisir pasean masih belum tersedia	<i>Cold Storage</i> merupakan infrastruktur penting yang saling berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.	<i>Cold Storage</i> merupakan salah satu komponen yang saling berkaitan saling berkaitan dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir secara menyeluruh da terpadu (Wiranto, 2004).	<i>Cold Storage</i> dibutuhkan sebelum barang komoditas yang didinginkan didistribusikan ke tempat tujuan dengan kendaraan yang sudah disediakan sistem pendingin tertentu.	
	Pabrik Es	Pabrik es di wilayah pesisir pasean masih belum tersedia, nelayan di pesisir pasean masih menggunakan es dari kulkas ukuran rumah tangga	Pabrik es merupakan komponen infrastruktur pesisir yang mempunyai peranan penting terhadap kegiatan wilayah pesisir.	Menurut (Wiranto, 2004), pabrik es merupakan keberlanjutan secara sosial ekonomi terkait aktivitas masyarakat pesisir yang identik dengan pemanfaatan sumber daya laut sehingga kebutuhan mengenai infrastruktur tersebut harus dikaitkan dengan aktivitas pesisir	Pabrik es dibutuhkan nelayan dalam jumlah yang cukup besar untuk menjaga kesegaran hasil laut sebelum dipasarkan.	

	Koperasi Unit Desa	KUD di wilayah pesisir pasean sudah tersedia akan tetapi kondisinya sudah rusak dn tidak berfungsi. Letak KUD berada di Desa Tlontoraja.	Koperasi unit desa merupakan infrastruktur yang mempunyai tujuan memenuhi keperluan para anggotanya, hal ini menjadikan koperasi unit desa sebagai infrastuktur yang penting terhadap pengembangan wilayah pesisir.	Menurut <i>Charles dalam Satria (2009)</i> , institusi keuangan desa merupakan prasyarat bagi tercapainya keberlanjutan pengembangan wilayah pesisir.	KUD di wilayah pesisir pasean yang terletak di Desa Tlontoraja dibutuhkan untuk mengorganisir kegiatan masyarakat dan nelayan dan usaha.	
ARAHAN	Peningkatan Kinerja Infrastruktur TPI, dan KUD Serta Penyediaan Infrastruktur Cold Storage dan Pabrik Es Sebagai Upaya Mendukung Pengembangan Sektor Perikanan dan Perdagangan Jasa wilayah Pesisir Pasean melalui perencanaan teknis berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Merevitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tlontoraja 2. Merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Tlontoraja 3. Menyediakan bangunan Cold Storage di Desa Batukerbuy 4. Menyediakan Pabrik Es di Desa Tlontoraja 					
Kuadran II (maintain performance)	Jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan kolektor primer sudah baik - Jaringan jalan kolektor sekunder banyak yang berlubang - Jaringan jalan lingkungan dengan jenis permukaan makadam - Akses dari lokasi TPI ke pasar masih belum diaspal (makadam) 	Jaringan jalan merupakan infrastruktur yang dibutuhkan di wilayah pesisir untuk memudahkan aksesibilitas kegiatan ekonomi wilayah pesisir ke wilayah lain.	Jaringan jalan merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (<i>Grigg, 2000</i>).i	Pada dasarnya penyediaan jaringan jalan di wilayah penelitian sudah terjangkau namun terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau seperti pada jalan penghubung antar kecamatan yaitu dari Kecamatan Waru ke Kecamatan Pasean. Berdasarkan hasil observasi dan analisis jaringan jalan lingkungan yang terdapat di Desa Bindang,	Penyediaan infrastruktur pendukung transportasi, pengelolaan limbah dan sanitasi sebagai upaya mendukung pengembangan sektor perikanan dan perdagangan jasa Selain itu diperlukan penanganan pada kondisi jalan yang berlubang serta pengaspalan pada jalur jalan yang masih makadam,

					<p>Desa Sotabar masih dalam kondisi makadam hal ini mempengaruhi kenyamanan dan tingkat keamanan lalu lintas kendaraan menjadi berkurang, begitu juga dengan aksesibilitas dari lokasi TPI di Desa Tlontoraja menuju ke pasar masih jauh dari kenamana hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya pengerasan pada badan jalan tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan jaringan jalan baik dari segi perbaikan badan jalan terutama terkait pengerasan, peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan sehingga jangkauan aksesibilitas antar aktifitas pengguna jalan dapat berjalan dengan baik dan juga dapat meningkatkan perkembangan</p>	<p>terutama pada akses dari tempat pevelanan ikan menuju pasar.</p>
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

					ekonomi serta mempercepat daya jangkau menuju pusat kota atau wilayah lain dan sekitarnya.	
	Moda Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan moda transportasi darat yang paling dominan adalah sepeda motor yang digunakan lebih sering untuk mobilitas internal wilayah. - Moda transportasi berupa pickup dan truck digunakan masyarakat sebagai moda sarana pengangkut hasil sumberdaya pesisir antar wilayah. 	Moda transportai sangat berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan wilayah pesisir untuk membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat.	Menurut <i>Grigg</i> 1988, moda transportasi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.	<p>Moda transportasi merupakan sarana penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir pasean dalam berpindah tempat. Kegiatan pemanfaatan moda transportasi masyarakat pesisir terbagi kedalam dua jenis :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pemanfaatan moda transportasi antar wilayah d. Pemanfaatan moda transportasi intern wilayah <p>Oleh karena itu, kemudahan moda transportasi yang mampu memaksimalkan pemanfaatan aksesibilitas harus ditangani secara serius baik itu jenis moda roda 2, roda 3 maupun roda 4. Jenis-jenis moda transportasi</p>	

					tersebut harus mampu menampung aktifitas pergerakan masyarakat pesisir pasean, tidak semua masyarakat memiliki kendaraan pribadi untuk melakukan mobilitas sehingga diperlukan moda transportasi umum.	
	Fasilitas Pendukung Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat pesisir yang terlayani oleh fasilitas transportasi masih belum merata - Fasilitas pendukung seperti terminal sudah tidak berfungsi yang ada di Desa Tlontoraja 	Fasilitas pendukung transportasi wilayah pesisir berperan penting terhadap pengembangan wilayah pesisir untuk memberikan pelayanan agar tujuan ekonomi dan social tercapai	Dalam <i>American Public Works Association (Stone, dalam yuki Yuki, 2008)</i> Fasilitas pendukung transportasi merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.	Pesisir pasean masih belum didukung oleh pelayanan fasilitas pendukung transportasi yang memadai. Hal ini mempengaruhi kelancaran mobilitas masyarakat, sehingga penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di wilayah sekitar pesisir pasean, fasilitas pendukung tersebut meliputi terminal, halte, dll.	
	Pengelolaan Limbah dan Sanitasi	- Belum terdapat pengolahan limbah dan sanitasi yang terpadu di	Pengelolaan limbah dan sanitasi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar	(Jan Jacobs, et al, 1999 dalam Sibarani 2002) bahwa drainase merupakan infrastruktur dasar.	Pengelolaan limbah dan sanitasi dibutuhkan pengembangan untuk mencegah	

		<p>masyarakat pesisir pasean.</p> <p>- Pada pengelolaan perikanan di TPI pasean juga belum terdapat pengelolaan limbah yang terpadu. Pengolahan limbah yang ada masih bersifat konvensional, dikumpulkan pada satu titik.</p>	<p>manusia dalam lingkup social dan ekonomi.</p>		<p>terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air kotor limbah permukiman maupun limbah dari hasil pengelolaan sumberdaya pesisir. Jika diperhatikan wilayah pesisir pasean belum terdapat sistem pengelolaan limbah dan sanitasi yang terpadu sehingga menyebabkan limbah dibuang tidak beraturan, hal ini juga terjadi di TPI pasean. Oleh karena itu, ketersediaan sistem pengelolaan limbah dan sanitasi ini harus menjadi salah satu prioritas pengembangan wilayah pesisir pasean</p>	
ARAHAN	<p>Penyediaan infrastruktur pendukung transportasi, pengelolaan limbah dan sanitasi sebagai upaya mendukung pengembangan sektor perikanan dan perdagangan jasa melalui perencanaan teknis berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merevitalisasi Terminal di Desa Tlontoraja 2. Membangun saluran pengelolaan limbah dan sanitasi di sepanjang jalur arteri dan lokal <p>Selain itu juga diperlukan penanganan pada kondisi jalan yang berlubang serta pengaspalan pada jalur jalan yang masih makadam, terutama pada akses dari tempat pelelangan ikan menuju pasar (Desa Tlontoraja).</p>					
Kuadran III (medium-low priority)	SPBU	Sudah tersedia satu fasilitas pengisian bahan bakar, akan tetapi tidak	SPBU merupakan kebutuhan yang mempunyai keterkaitan dengan	kebutuhan mengenai infrastruktur harus dikaitkan dengan aktivitas	SPBU dibutuhkan untuk mempermudah para nelayan yang	Pengadaan fasilitas SPBU untuk melayani nelayan dalam mendukung

		dioperasikan. SPBU tersebut berada di Desa Tlontoraja	aktivitas pesisir untuk memudahkan kegiatan sosial ekonomi wilayah pesisir	pesisir seperti SPBU (Wirato,2004).	menggunakan bahan bakar	sektor perikanan dan perdagangan jasa
ARAHAN	Pengadaan fasilitas SPBU untuk melayani nelayan dalam mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa melalui perencanaan teknis merevitalisasi di Desa Tlontoraja					
Kuadran IV (<i>reduce emphasis</i>)	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Timbulan sampah pesisir pasean didominasi oleh sampah hasil dari permukiman, pasar dan TPI. - Pengelolaan persampahan pada pesisir pasean masih tergolong konvensional dengan cara ditimbun, dibakar, atau dikumpulkan pada beberapa titik. 	Persampahan adalah salah satu fasilitas yang memudahkan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan dampak lingkungan kotor di wilayah pesisir.	Komponen infrastruktur merupakan bagian-bagian dari infrastruktur yang dianggap memiliki peran penting terhadap perekonomian dan sosial. Dalam World Development Report (1994). Salah satunya persampahan.	Jika diperhatikan wilayah pesisir pasean belum terdapat sistem pengelolaan persampahan walaupun tidak menjadi masalah di sekitar wilayah pesisir pasean, namun jika sampah tidak dikelola dengan baik lama-kelamaan akan berdampak negatif baik itu terhadap lingkungan dan masyarakat hal ini juga terjadi di sekitar TPI yang berada di Desa Tlontoraja. Oleh karena itu, ketersediaan sistem pengelolaan persampahan harus menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan wilayah pesisir pasean.	<p>Penyediaan infrastruktur persampahan dan drainase sebagai upaya mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa</p> <p>Dalam mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa, telekomunikasi, jaringan air bersih dan jaringan listrik dipertahankan kinerjanya agar tetap bekerja dengan baik dan layak.</p>

	Drainase	Fasilitas drainase di wilayah pesisir Pasean belum tersedia.	Drainase di wilayah pesisir merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan public yang penting terhadap aktivitas wilayah pesisir.	Menurut <i>Grigg</i> 1988, infrastruktur pada sistem fisik yang menyediakan drainase dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.		
	Telekomunikasi	Penggunaan sarana telekomunikasi sudah didominasi oleh sarana jaringan nirkabel dari BTS seluler	Telekomunikasi dipandang sebagai pondasi bagi peningkatan standar masyarakat untuk saling berinteraksi.	Akatsuka dan Yoshida dalam <i>Delis</i> (2008) mempertimbangkan telekomunikasi sebagai <i>social overhead</i> dan berperan sebagai pondasi bagi aktivitas-aktivitas ekonomi dan industry.	Pemanfaatan jaringan telekomunikasi sudah optimal. Pelayanan jaringan yang ada sudah menjangkau pesisir pasean secara merata.	
	Jaringan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar wilayah penelitian sudah terjangkau oleh jaringan pelayanan air bersih - Pemanfaatan air bersih lebih digunakan pada permukiman. - Pemanfaatan air bersih pada kegiatan sumberdaya pesisir seperti pengolahan ikan dan TPI sudah terpenuhi. 	Jaringan air bersih merupakan bagian infrastruktur yang memiliki peran penting terhadap perekonomian dan social.	Tertera bahwa di Indonesia tingkat kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan air bersih secara kontinu terus meningkat dari tahun ke tahun. Dimana peningkatan rata-rata penggunaan air bersih sebesar 7,31%. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur air bersih merupakan salah satu prioritas dari pengeluaran pembangunan dari pemerintah daerah yang bersangkutan (<i>Taufiq</i> , 2006).	Kebutuhan jaringan air bersih menjadi salah satu infrastruktur yang penting dalam pemanfaatannya pada pesisir pasean. Terlihat pada pemanfaatannya yang bersinggungan langsung dengan kegiatan ekonomi dan social masyarakat. Ketersediaan jaringan air bersih yang sudah memadai maka, pemeliharaan dan peningkatan	

					kualitas maupun kuantitas harus diperhatikan dengan serius	
	Jaringan Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan energy listrik pada pesisir pasean lebih dimanfaatkan pada kegiatan sosial masyarakat sebagai penerangan utama permukiman. - Pemanfaatan pada kegiatan perikanan dan sumberdaya lain masih sebatas pada supplay pokok yang sudah terpenuhi. 	Jaringan listrik adalah infrastruktur yang mempunyai peran penting terhadap keberlangsungan kegiatan wilayah pesisir.	Menyatakan pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh penambahan kapasitas listrik. Kapasitas listrik adalah daya listrik terpasang. (Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar, 2009.	Kebutuhan energi listrik pada pesisir pasean sudah terpenuhi secara merata. Ketersediaan jaringan listrik sudah memadai maka, pemeliharaan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas harus diperhatikan dengan serius	
ARAHAN	<p>Penyediaan infrastruktur persampahan dan drainase sebagai upaya mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa melalui perencanaan teknis seperti berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merevitalisasi TPS di Desa Batukerbuy 2. Membangun Drainase pada jaringan lingkungan di wilayah pesisir pasean <p>Dalam mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa, telekomunikasi, jaringan air bersih dan jaringan listrik melalui perencanaan teknis sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja Telekomunikasi di wilayah pesisir pasean 2. Peningkatan kinerja Jaringan Air Bersih di wilayah pesisir pasean 3. Peningkatan kinerja Jaringan Listrik di wilayah pesisir pasean 					

Sumber: Hasil Analisa, 2015

“halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan beberapa sumber dalam menentukan infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir sebagai upaya mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa, maka diperoleh urutan infrastruktur yang dibutuhkan setelah melalui berbagai pertimbangan antara lain dengan memperhatikan kondisi eksisting, analisis IPA dan tinjauan pustaka. Infrastruktur yang menjadi prioritas sehingga diperlukan pengembangan dalam tingkat pelayanan dan kinerjanya antara lain:

1. (Kuadran I) Peningkatan Kinerja Infrastruktur TPI, dan KUD Serta Penyediaan Infrastruktur Cold Storage dan Pabrik Es Sebagai Upaya Mendukung Pengembangan Sektor Perikanan dan Perdagangan Jasa wilayah Pesisir Pasean melalui perencanaan teknis berikut ini:
 - a. Merevitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Tlontoraja
 - b. Merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di Desa Tlontoraja
 - c. Menyediakan bangunan Cold Storage di Desa Batukerbuy
 - d. Menyediakan Pabrik Es di Desa Tlontoraja
2. (Kuadran II) Penyediaan infrastruktur pendukung transportasi, pengelolaan limbah dan sanitasi sebagai upaya mendukung pengembangan sektor perikanan dan

perdagangan jasa melalui perencanaan teknis berikut ini:

- a. Merevitalisasi Terminal di Desa Tlontoraja
- b. Membangun saluran pengelolaan limbah dan sanitasi di sepanjang jalur arteri dan lokal

Selain itu juga diperlukan penanganan pada kondisi jalan yang berlubang serta pengaspalan pada jalur jalan yang masih makadam, terutama pada akses dari tempat pelelangan ikan menuju pasar (Desa Tlontoraja).

3. (Kuadran III) Pengadaan fasilitas SPBU untuk melayani nelayan dalam mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa melalui perencanaan teknis merevitalisasi di Desa Tlontoraja

4. (Kuadran IV) Penyediaan infrastruktur persampahan dan drainase sebagai upaya mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa melalui perencanaan teknis seperti berikut ini:

- a. Merevitalisasi TPS di Desa Batukerbuy
- b. Membangun Drainase pada jaringan lingkungan di wilayah pesisir pasean

Dalam mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa, telekomunikasi, jaringan air bersih dan jaringan listrik melalui perencanaan teknis sebagai berikut

- a. Peningkatan kinerja Telekomunikasi di wilayah pesisir pasean
- b. Peningkatan kinerja Jaringan Air Bersih di wilayah pesisir pasean
- c. Peningkatan kinerja Jaringan Listrik di wilayah pesisir pasean

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan landasan atau acuan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir untuk mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa dengan pertimbangan beberapa aspek yang telah direncanakan.
2. Terkait penentuan kebutuhan infrastruktur, perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dengan Desa Tlontoraja, Desa Batukerbuy, Desa Sotabar, dan Desa Bindang
3. Diperlukan adanya studi lanjutan mengenai pengembangan infrastruktur wilayah pesisir untuk mendukung sektor perikanan dan perdagangan jasa.

“halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku

- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 2000, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta
- Kodoatie, Robert J., 2003, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kodoatie, Robert J., 2005, *Pengantar Manajemen Infrastruktur*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin, 2004, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: Pustaka LP3ES

Rencana Tata Ruang Terkait

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, 2012. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan tahun 2012-2032*, Pamekasan: Pemkab Pamekasan
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan, 2012. *Rencana zona Wilayah Pesisir Kabupaten Pamekasan tahun*: Pamekasan: Pemkab Pamekasan
- Departemen Kelautan & Perikanan RI, 2002. Keputusan Menteri Kelautan & Perikanan Nomor: Kep. 18/Men/2002 Tentang Rencana Strategis Pembangunan Kelautan & Perikanan Tahun 2001 – 2004. Jakarta: Departemen Kelautan & Perikanan RI

Departemen Kelautan & Perikanan RI, 2006. *Regulasi*.
<http://www.dkp.go.id/>. tanggal akses 4 Januari 2006

Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah RI, 2006. *Buku Profil Penataan Ruang Propinsi Jawa Timur 2003*.
<http://www.kimpraswil.go.id>. Tgl akses: 20 Juni 2006

Kantor Statistik Kabupaten Pamekasan, 2014, *Kabupaten Pamekasan dalam Angka Tahun 2004*, Pamekasan: Pemkab Pamekasan

Kantor Statistik Kabupaten Pamekasan, 2014, *Kecamatan Pasean dalam Angka Tahun 2013*, Pamekasan: Pemkab Pamekasan

Kantor Statistik Kabupaten Pamekasan, 2014, *Kecamatan Pasean dalam Angka Tahun 2014*, Pamekasan: Pemkab Pamekasan

Kantor Kecamatan Pamekasan, 2014, *Profil Kecamatan Pasean Tahun 2013*, Pamekasan: Pemkab Pamekasan

Jurnal

Koswara, Arwi Yudhi (2009), *Pengembangan Infrastruktur di Pulau Madura Berdasarkan Potensi Wilayahnya, Proceeding Seminar Nasional Pengembangan infrastruktur di Daerah*, Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta

Tugas Akhir

Zulkhah, Siti (1998), *Identifikasi Sektor Unggulan Sebagai Arah Pengembangan Wilayah di Kecamatan*

Paciran dan Kecamatan Brondong Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Jurusan Planologi ITN

Adiwena, Dewangga Putra (2012), *Konsep Pengendalian Penggunaan Lahan Kawasan Cagar Budaya Gunung Penanggungan*, Kabupaten Mojokerto, *Skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS

Hendrayati, Hamida (2006), *Penentuan Lokasi Industri Pengolahan Ikan di Kawasan Pesisir Kabupaten Lamongan, Skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS

Sertaningati, Heppi (2006), *Strategi Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kota Surabaya: Suatu Pendekatan Konsep Pemasaran Kota, Skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS

Setiyawardana, Dimas (2008), *Pengembangan Infrastruktur Kecamatan Bulak Dalam Mendukung Kegiatan Wisata Kawasan Kenjeran, Skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS

“halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran A

Tabel 1
Pemetaan *Stakeholder* Menurut Kepentingan dan Pengaruh

Kelompok <i>Stakeholder</i>	<i>Interest Stakeholder</i> terhadap Perumusan Arah-an Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir pada Sektor Perikanan dan Perdagangan Jasa di Kecamatan Pasean	Pengaruh (<i>Influence</i>) <i>Stakeholder</i> terhadap Perumusan Arah-an Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir pada Sektor Perikanan dan Perdagangan Jasa di Kecamatan Pasean	Dampak Program terhadap <i>Interest</i> (+) (0) (-)	Kepentingan (<i>Importance</i>) <i>Stakeholder</i> terhadap Kesuksesan Program 1 = <i>little/no importance</i> 2 = <i>some importance</i> 3 = <i>moderate importance</i> 4 = <i>very importance</i> 5 = <i>critical player</i>	Pengaruh (<i>Influence</i>) <i>Stakeholder</i> terhadap Program 1 = <i>little/no importance</i> 2 = <i>some importance</i> 3 = <i>moderate importance</i> 4 = <i>very importance</i> 5 = <i>critical player</i>
Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (Bappekab)	Sebagai perumus kebijakan pembangunan terkait bidang fisik dan bidang ekonomi.	Memberikan pertimbangan dalam penentuan tingkat kepentingan dan kinerja infrastruktur wilayah pesisir	+	4	4
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	Sebagai penyusun peraturan daerah terkait dengan strategi pembangunan.	Sebagai penyusun peraturan daerah terkait dengan strategi pembangunan kawasan serta berperan dalam penyelenggaraan infrastruktur pesisir.	+	4	4

Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan mampu memberikan pertimbangan.	Sebagai penyusun peraturan daerah terkait dengan rencana pengembangan wilayah pesisir serta mampu memberikan pertimbangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan wilayah pesisir	+	4	4
Dinas perhubungan dan komunikasi informasi	Dinas perhubungan dan komunikasi informasi mampu memberikan pertimbangan	Mampu memberikan pertimbangan dalam menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan wilayah pesisir	+	4	4
Akademisi atau Pakar Ahli Infrastruktur	Mempunyai andil dalam memberikan pertimbangan.	Menjadi salah satu motor pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengembangan infrastruktur untuk menunjang kegiatan wilayah pesisir	+	4	4
Kantor Kecamatan Pasean	Mampu memberikan masukan terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir	Mampu memberikan masukan terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir karena merupakan pihak yang sangat mengetahui potensi	+	4	4

		dan masalah, sehingga akan menghasilkan faktor-faktor yang lebih kompleks lagi untuk dapat memecahkan masalah penelitian.			
Tokoh Masyarakat di Kawasan	Tokoh masyarakat memberikan masukan pada peneliti.	Tokoh masyarakat memberikan masukan pada peneliti terkait dengan infrastruktur wilayah pesisir	+	4	4

Keterangan :

Pengaruh Stakeholder	Pentingnya Aktivitas Stakeholder
0 = Tidak diketahui pengaruhnya	0 = Tidak diketahui pengaruhnya
1 = Agak berpengaruh	1 = Agak berpengaruh
2 = Pengaruhnya kecil/tidak ada	2 = Pengaruhnya kecil/tidak ada
3 = Berpengaruh	3 = Berpengaruh
4 = Sangat berpengaruh	4 = Sangat berpengaruh

Tabel 2
Pemetaan *Stakeholder* Berdasarkan Pengaruh (*Influence*) dan Kepentingan (*Importance*)

Influence of Stakeholder	Importance of Activity to Stakeholder				
	<i>Little/No Importance</i>	<i>Some Importance</i>	<i>Moderate Importance</i>	<i>Very Big Importance</i>	<i>Critical Player</i>
Little/No Importance					
Some Importance					
Moderate Importance					
Significant Influence					
Very Big Influence					<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) • Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang • Dinas Kelautan dan Perikanan • Dinas Perhubungan dan

					<p>Komunikasi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Akademisi atau Pakar Ahli Infrastruktur• Kantor Kecamatan Pasean• Tokoh Masyarakat di Wilayah Pesisir
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUESIONER PENELITIAN
Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir di Kecamatan
Pasean Kabupaten Pamekasan

A. Latar Belakang

Dengan hormat,

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Kabupaten Pamekasan, serta seberapa baik kinerja infrastrukturnya.

Dengan ini peneliti berharap kesediaan bapak/ibu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Terima kasih atas kesediaan Anda.

Peneliti

Nur Hidayat

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota - FTSP
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Stakeholders :

C. Kuesioner

Kategorikan infrastruktur di bawah ini sesuai dengan tingkat kepentingan dan kinerja menurut Anda?

Tabel 3

Tingkat Kepentingan					Jenis Infrastruktur	Kinerja				
Sangat Kurang Penting	Kurang Penting	Cukup Penting	Penting	Sangat Penting		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI										
					Jaringan Jalan					
					Moda Transportasi					
					Fasilitas Pendukung Transportasi					
UTILITAS										
					Jaringan Air Bersih					
					Jaringan Listrik					
					Sistem Drainase					
					Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi					
					Telekomunikasi					
					Persampahan					
ASPEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PESISIR										
					Tempat Pelelangan Ikan					
					<i>Cold Storage</i>					
					Pabrik Es					
					SPBU					
					Koperasi unit desa					

Tabel 4
HASIL KUISIONER IMPORTANCE-PERFORMANCE
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tingkat Kepentingan					Jenis Infrastruktur	Kinerja				
Sangat Kurang Penting	Kurang Penting	Cukup Penting	Penting	Sangat Penting		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI										
					Jaringan Jalan					
					Moda Transportasi					
					Fasilitas Pendukung Transportasi					
UTILITAS										
					Jaringan Air Bersih					
					Jaringan Listrik					
					Sistem Drainase					
					Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi					
					Telekomunikasi					
					Persampahan					
ASPEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PESISIR										
					Tempat Pelelangan Ikan					
					<i>Cold Storage</i>					
					Pabrik Es					
					SPBU					
					Koperasi unit desa					

Tabel 5
HASIL KUISIONER IMPORTANCE-PERFORMANCE
Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

Tingkat Kepentingan					Jenis Infrastruktur	Kinerja				
Sangat Kurang Penting	Kurang Penting	Cukup Penting	Penting	Sangat Penting		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI										
					Jaringan Jalan					
					Moda Transportasi					
					Fasilitas Pendukung Transportasi					
UTILITAS										
					Jaringan Air Bersih					
					Jaringan Listrik					
					Sistem Drainase					
					Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi					
					Telekomunikasi					
					Persampahan					
ASPEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PESISIR										
					Tempat Pelelangan Ikan					
					<i>Cold Storage</i>					
					Pabrik Es					
					SPBU					
					Koperasi unit desa					

Tabel 6
HASIL KUISIONER IMPORTANCE-PERFORMANCE
Dinas Kelautan dan Perikanan

Tingkat Kepentingan					Jenis Infrastruktur	Kinerja				
Sangat Kurang Penting	Kurang Penting	Cukup Penting	Penting	Sangat Penting		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI										
					Jaringan Jalan					
					Moda Transportasi					
					Fasilitas Pendukung Transportasi					
UTILITAS										
					Jaringan Air Bersih					
					Jaringan Listrik					
					Sistem Drainase					
					Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi					
					Telekomunikasi					
					Persampahan					
ASPEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PESISIR										
					Tempat Pelelangan Ikan					
					<i>Cold Storage</i>					
					Pabrik Es					
					SPBU					
					Koperasi unit desa					

Tabel 7
HASIL KUISIONER IMPORTANCE-PERFORMANCE
Dinas Perhubungan dan Komunikasi

Tingkat Kepentingan					Jenis Infrastruktur	Kinerja				
Sangat Kurang Penting	Kurang Penting	Cukup Penting	Penting	Sangat Penting		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI										
					Jaringan Jalan					
					Moda Transportasi					
					Fasilitas Pendukung Transportasi					
UTILITAS										
					Jaringan Air Bersih					
					Jaringan Listrik					
					Sistem Drainase					
					Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi					
					Telekomunikasi					
					Persampahan					
ASPEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PESISIR										
					Tempat Pelelangan Ikan					
					<i>Cold Storage</i>					
					Pabrik Es					
					SPBU					
					Koperasi unit desa					

Tabel 8
HASIL KUISIONER IMPORTANCE-PERFORMANCE
Kantor Kecamatan Pasean

Tingkat Kepentingan					Jenis Infrastruktur	Kinerja				
Sangat Kurang Penting	Kurang Penting	Cukup Penting	Penting	Sangat Penting		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI										
					Jaringan Jalan					
					Moda Transportasi					
					Fasilitas Pendukung Transportasi					
UTILITAS										
					Jaringan Air Bersih					
					Jaringan Listrik					
					Sistem Drainase					
					Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi					
					Telekomunikasi					
					Persampahan					
ASPEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PESISIR										
					Tempat Pelelangan Ikan					
					<i>Cold Storage</i>					
					Pabrik Es					
					SPBU					
					Koperasi unit desa					

Tabel 9
HASIL KUISIONER IMPORTANCE-PERFORMANCE
Tokoh Masyarakat

Tingkat Kepentingan					Jenis Infrastruktur	Kinerja				
Sangat Kurang Penting	Kurang Penting	Cukup Penting	Penting	Sangat Penting		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI										
					Jaringan Jalan					
					Moda Transportasi					
					Fasilitas Pendukung Transportasi					
UTILITAS										
					Jaringan Air Bersih					
					Jaringan Listrik					
					Sistem Drainase					
					Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi					
					Telekomunikasi					
					Persampahan					
ASPEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PESISIR										
					Tempat Pelelangan Ikan					
					<i>Cold Storage</i>					
					Pabrik Es					
					SPBU					
					Koperasi unit desa					

Tabel 10
HASIL KUISIONER IMPORTANCE-PERFORMANCE
Akademisi atau Pakar Infrastruktur Pesisir

Tingkat Kepentingan					Jenis Infrastruktur	Kinerja				
Sangat Kurang Penting	Kurang Penting	Cukup Penting	Penting	Sangat Penting		Sangat Kurang Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI										
					Jaringan Jalan					
					Moda Transportasi					
					Fasilitas Pendukung Transportasi					
UTILITAS										
					Jaringan Air Bersih					
					Jaringan Listrik					
					Sistem Drainase					
					Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi					
					Telekomunikasi					
					Persampahan					
ASPEK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PESISIR										
					Tempat Pelelangan Ikan					
					<i>Cold Storage</i>					
					Pabrik Es					
					SPBU					
					Koperasi unit desa					

HASIL REKAP KUISIONER *IMPORTANCE-PERFORMANCE*

Tabel 11
Pembobotan Kepentingan Infrastruktur Menurut Stakeholders

Responden	Variabel													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	4	4	3	3	3	4	2	3	5	5	4	3	3
2	4	5	4	4	3	3	5	3	4	4	4	4	3	3
3	4	5	4	3	3	3	4	4	4	5	5	4	4	4
4	4	4	5	2	2	3	3	4	3	4	3	3	4	3
5	5	3	4	3	3	4	4	3	3	4	5	5	4	5
6	5	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	5	4	5
7	5	5	4	4	3	4	3	3	4	5	4	5	4	5
Jumlah	32	30	30	22	20	24	27	22	24	32	30	30	28	28

Tabel 12
Pembobotan Kinerja Infrastruktur Menurut Stakeholders

Responden	Variabel													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	1	1	1	1	2
2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	1	1	1	2
3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
4	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	2	2
5	2	3	1	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
6	1	3	3	2	3	2	2	3	3	1	1	1	1	1
7	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	2
Jumlah	17	20	16	20	21	20	18	21	21	9	7	7	8	11

Keterangan :

- Variabel 1 : Jaringan Jalan
- Variabel 2 : Moda transportasi
- Variabel 3 : Fasilitas pendukung transportasi
- Variabel 4 : Jaringan air bersih
- Variabel 5 : Jaringan listrik
- Variabel 6 : Drainase
- Variabel 7 : Sistem pengelolaan limbah dan sanitasi
- Variabel 8 : Telekomunikasi
- Variabel 9 : Persampahan
- Variabel 10 : Tempat pelelangan ikan
- Variabel 11 : *Cold storage*
- Variabel 12 : Pabrik es
- Variabel 13 : SPBU
- Variabel 14 : Koperasi Unit Desa

Biodata Penulis



Penulis dilahirkan di Pamekasan, 3 Agustus 1990 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis antara lain SDN Barurambat Kota II Pamekasan, SMPN 2 Pamekasan, SMAN 1 Pamekasan, dan terakhir terdaftar di Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota – ITS dengan NRP 3609100005 melalui jalur PMDK Mandiri. Selama menjadi mahasiswa, penulis secara aktif dalam organisasi

Himpunan Mahasiswa Planologi-ITS sebagai Kepala Departemen Dalam Negeri dan bergabung dengan organisasi di luar kampus. Diantaranya adalah sebagai Koordinator Komunitas Pemuda Sepuluh Nopember dan Ketua Cabang Pemuda Demokrat Indonesia.